

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Skripsi ini bermaksud untuk meneliti dampak krisis iklim terhadap kerentanan gender termasuk di dalamnya perempuan petani. Perlu diingat kembali bahwa krisis iklim menjadi ancaman nyata yang dihadapi warga global dimulai sejak peradaban industri/modern dan menjadi ancaman yang tidak bisa dihindari. Namun, sangat disayangkan problematika iklim yang terjadi seringkali dipusatkan hanya pada paradigma teknis, walau sejatinya krisis iklim lebih dari sekadar suhu dan curah hujan. Dampak negatif dari krisis iklim begitu terasa secara politis dalam tatanan sosial masyarakat, khususnya bagi kelompok-kelompok yang dianggap lemah kemampuan adaptasinya dan tidak mempunyai akses terhadap sumber daya tertentu dimana tidak lain merujuk pada isu kerentanan. Terlebih pada diskursus ini, kehadiran krisis iklim di tengah masyarakat dilihat dengan tendensi yang bias. Dengan kata lain adaptasi krisis iklim tidak benar-benar berdiri secara netral —melainkan menghasilkan perbedaan dan ketidakadilan antara satu dengan yang lainnya, secara khusus kaum laki-laki dan perempuan —dalam hal ini yang dirasakan oleh perempuan secara spesifik perempuan petani —demikian inilah tidak dapat digali dengan hanya melihat sudut paradigma teknis. (Call & Sellers, 2019; Denton, 2002; Houria Djoudi et al., 2016; Goodrich, Udas, & Larrington-Spencer, 2019; Kaijser & Kronsell, 2014; Tompkins & Adger, 2004)

Sebelum membawa diskusi ini lebih dalam, adapun digunakannya terminologi krisis iklim didasari dengan bergesernya terminologi perubahan iklim

menjadi ‘krisis iklim’ untuk menekankan keadaan iklim global yang sedang darurat/krisis dibandingkan terminologi ‘perubahan iklim’ yang dirasa terlalu lembut dan kurang berbunyi sebagai ancaman yang memusnahkan dan/atau merugikan, hal ini dilansir oleh situs jurnalistik independen *The Guardian*<sup>1</sup>, diperkuat dengan tulisan (Spratt, Dunlop, By, & Joachim, n.d., 2019) berjudul *What Lies Beneath* yang menyematkan terminologi ‘*Climate Crisis*’ oleh ilmuwan iklim Prof. Hans Joachim Schellnhuber tersebut.

Walaupun istilah krisis iklim tidak digunakan dalam banyak referensi pada penelitian ini, bagaimanapun senada dengan terminologi perubahan iklim, keduanya tetap mengacu pada setiap perubahan keadaan iklim global yang menjadi genting, baik diakibatkan oleh perubahan-perubahan alam itu sendiri maupun hasil dari aktivitas manusia, dimana secara fisik, aktivitas manusia memberikan sumbangsih terbesar dengan hadirnya fenomena *greenhouse gases effect (GHGs)* dan *Carbon Cycle* sebagai penyebab utama terganggunya keseimbangan komposisi energi di atmosfer —yang mengakibatkan krisis iklim —dengan berubahnya tantangan dan ketidakpastian iklim. Sebagai contoh, pola hujan dan panas yang tidak teratur seperti pada wilayah pertanian (UNDP, 2009). Hal ini diperburuk dengan kondisi negara-negara belahan dunia selatan (*emerging countries*) yang rata-rata masih mengandalkan kehidupannya pada alam dan/atau hasil alam atau pertanian dimana dari dimensi sosial termasuk di Indonesia —krisis iklim akan sungguh menentukan hasil produktivitas dan alternatif penghidupan lainnya untuk keberlanjutan pertanian dan petani itu sendiri (Hall & Weiss, 2013).

---

<sup>1</sup> <https://www.theguardian.com/environment/2019/may/17/why-the-guardian-is-changing-the-language-it-uses-about-the-environment>

Namun, konsekuensi mengenai iklim hanya berbicara sebatas produktivitas lahan saja, apakah demikian? Seperti diskusi pada awal paragraf tulisan ini, paradigma teknis sudah tidak dapat menjadi acuan tunggal dalam melihat sebuah fenomena yaitu krisis iklim. Terjadinya fenomena krisis iklim terlalu kompleks untuk disimplifikasi sebagai masalah lingkungan saja, tetapi masalah ini juga menjadi terlalu sederhana jika hanya diteropong melalui paradigma teknis. Sebagai contoh, jika diruntut kembali pada pokok bahasan produktivitas lahan diatas, hal tersebut bukan satu-satunya akibat yang ditimbulkan dari krisis iklim melainkan subjek atau aktor atasnya, apakah kemampuan adaptasi fenomena tersebut hadir secara tepat atau tidak —oleh karena itu petani pantas untuk disorot. Nyatanya, petani perempuan dan laki-laki yang tidak jarang menjadi satu keluarga memiliki hubungan gender satu sama lain. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Menilik buah paradigma politik, pada tingkatan mikro, hubungan gender antar subjek dan aktor dalam pertanian tidak lah terjadi begitu saja, hubungan-hubungan aktivitas dan praktik-praktik empirik yang terjadi berulang kali dalam kehidupan besosial dan bermasyarakat petani hingga pada akhirnya saling memengaruhi posisi atau peran antara perempuan petani dan laki-laki. Hal tersebut akan ditentukan dengan pola relasi (termasuk jenis relasi kuasa), budaya, dan struktur masyarakat hingga diperoleh keluaran siapa yang lebih rentan dan dirugikan atas terjadinya fenomena krisis iklim (Arora-Jonsson, 2011; Avelino & Rotmans, 2009).

Kembali pada *thesis* penelitian ini, tentu saja gambaran diatas sesungguhnya adalah sebuah permukaan yang selama ini didominasi oleh paradigma teknis, tetapi gagal dijelaskan jika menggunakan paradigma tersebut —termasuk mengenai studi

krisis iklim. Walaupun begitu, paradigma tersebut agaknya sudah banyak berganti, dengan perkembangan yang mencoba memahami dan menggugat kondisi seutuhnya termasuk dengan adanya penelitian ini, untuk melihat dibalik adanya ancaman yang saat ini hadir di depan mata —utamanya aspek sosial dan politik. Hal ini dikarenakan signifikansi krisis iklim tidak hanya memengaruhi keadaan lingkungan melainkan turut memengaruhi tatanan sosial untuk mencari pemahaman tentang bagaimana krisis iklim dialami, siapa yang terdampak, apa saja dampaknya, dan bagaimana cara mengatasinya, khususnya dilihat dari segi sosial-politik yang hendak dikupas. Sebagai contoh pada tingkatan makro, dimana peran kontrol dan respon dari kuasa pemerintah seolah ‘absen’ melihat dan menyentuh secara holistik, terjadi ketimpangan atas kontrol dan monitoring dari pemerintah yang seharusnya ada dalam kuasa pemerintah. Termasuk bila melihat krisis iklim sebagai dampak dari aktivitas manusia seperti kegiatan ekonomi industri, penebangan ilegal, dan kontrol emisi yang dampaknya secara destruktif pun tidak terkontrol. Hingga kemudian memunculkan dikotomi atau jurang pemisah atas siapa yang menjadi ‘*ekstrimist*’ atau paling rentan dan dirugian, sebaliknya siapa yang tidak akibat berubahnya iklim sebagai bagian dari proses politik yang tidak terkontrol (Goodrich et al., 2019; MacGregor, 2010).

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk turut melengkapi perkembangan penelitian-penelitian yang telah ada pada aspek sosial-politik dalam melihat dampak fenomena krisis iklim, terlebih untuk menggali potret atau pengalaman perempuan petani yang selam ini turut menjadi bagian terdampak krisis iklim di Indonesia. Dalam menggali fenomena yang ada, penelitian ini menggunakan

analisis interseksional sebagai pendekatan untuk mengetahui perbedaan gender yang terjadi secara lebih baik yang akan diperjelas pada paragraf lain (Call & Sellers, 2019; Denton, 2002; H. Djoudi & Brockhaus, 2011; Houria Djoudi et al., 2016; Eastin, 2018; Kaijser & Kronsell, 2014; Tompkins & Adger, 2004).

Setelah melihat diskusi, kehadiran dimensi politik cukup signifikan dalam membuktikan bahwa fenomena krisis iklim dan gender tidaklah terjadi secara setara melainkan timpang relasinya, berdampak kepada cara beradaptasi sebuah kelompok masyarakat (relasi gender laki-laki dan perempuan) yang hidup dalam tempurung krisis iklim—disadari atau tidak telah menciptakan ketidakadilan (Rusmadi, 2017). Lebih lanjut bukti dari Carr & Thompson (2014) menyebutkan bahwa implikasi krisis iklim terjadi pada relasi gender dijelaskan ke dalam pola kerja (kewajiban) dan kepercayaan yang digambarkan dengan istilah '*differentiated vulnerabilities*' (anggota masyarakat satu sama lain mengalami/merespon sebuah kejadian atau fenomena yang sama secara berbeda-beda) dan '*distinct vulnerabilities*' (anggota masyarakat terpapar suatu kejadian atau fenomena yang berbeda satu sama lainnya) (Carr, 2008; Carr & Thompson, 2014). Sebagai contoh krisis iklim akan berbeda bagi kelompok masyarakat petani dan nelayan, namun juga akan berbeda dan memunyai ciri yang berbeda di dalam masyarakat petani perempuan dan laki-laki, bahkan antara perempuan petani satu dengan yang lainnya dapat berbeda.

Hal diatas memperkuat bahwa krisis iklim memberi dampak bagi kerentanan masyarakat melalui pola struktur dan budaya yang digambarkan dengan gender seringkali memperlemah posisi perempuan khususnya pada interseksi konteks geografi, sosial-politik, dan sosial-ekonomi. Singkatnya, banyak hambatan

dan peluang yang terkait dampak krisis iklim terbentuk dalam berbagai persimpangan atas kewajiban (pola kerja) dan kepercayaan yang melekat pada seberapa besar diferensiasi sosial hadir di suatu masyarakat. Walaupun begitu, Carr dan Thompson (2014) pada artikel jurnal ini tidak secara jelas menggambarkan bagaimana relasi kerentanan dan kategorisasi atau diferensiasi sosial berbasis gender pada perempuan terbentuk secara politik sebagai dampak krisis iklim.

Selanjutnya, pola interseksi politis kerentanan gender dalam krisis iklim semakin mengerucut pada literatur oleh Arora-Jonsson (2011) yang memaparkan diskursus perempuan, gender, dan perubahan iklim terhadap keunggulan dan kerentanannya. Dengan memperbandingkan kondisi yang berbeda antara kerentanan dan keunggulan perempuan dunia bagian selatan (India) dan bagian utara (Swedia) yang keduanya bermuara dengan menghasilkan dampak yang sama yaitu disebabkan oleh dominasi peran laki-laki dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan krisis iklim. Walaupun pada konteks ini telah mengindahkan keunggulan perempuan dalam konteks krisis iklim —lebih responsif dan adaptif. Namun, hasil yang didapatkan tetap berpedoman pada struktur dan diferensiasi sosial seolah mengenyampingkan keunggulan perempuan tersebut dikarenakan dominasi peran laki-laki dalam pengambilan kebijakan iklim di wilayah masing-masing (Arora-Jonsson, 2011)

Arora-Jonsson juga menemukan bahwa perempuan dengan keadaan miskin sering kali menjadi satu-satunya pembenaran terhadap faktor kerentanan perempuan. Namun, ia menggambarkan kerentanan dihasilkan dari sebuah atau sekumpulan pengalaman empirik yang terjadi berkali-kali dan dengan situasi yang

berbeda-beda. Hal ini memperkuat *statement* peneliti bahwa respon terhadap krisis iklim menjadi sangat subjektif dan akan tercermin pada perilaku individu-individu yang disesuaikan oleh masing-masing pemahamannya terhadap krisis iklim —terbentuk karena proses sosial-politik dan sosial ekonomi (termasuk norma-norma gender). Sebagai contoh pendapat perempuan di India tidak begitu dipentingkan dibanding laki-laki mengingat variabilitas peran, norma, dan struktur sosial, bahkan telah melekat sekalipun keunggulan perempuan saat menangani banjir di hilir sungai melawan kerentanannya yang ada pada dirinya.

Dari kedua jurnal tersebut, dapat ditarik benang merah dengan argumen, representasi afirmatif keunggulan dan kerentanan perempuan berada dalam ketidaksetaraan relasi kuasa yang selalu dipengaruhi oleh bagaimana relasi gender dan pemahaman yang berjalan pada konteks sosial tertentu menghadapi fenomena krisis iklim (Arora-Jonsson, 2011). Kedua jurnal diatas tentu telah melandasi logika berpikir peneliti bahwa implikasi krisis iklim terhadap kerentanan gender muncul akibat respon masyarakat tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh diferensiasi dan konteks sosial sesuai dengan wilayah yang terdampak.

Dengan demikian peneliti tentu menyadari bahwa perlu adanya koneksi yang menjelaskan dimensi sosial-politik dari krisis iklim yang kemudian memunculkan pertanyaan —bagaimana krisis iklim secara khusus mengakibatkan kerentanan dan ketidaksetaraan terhadap perempuan khususnya perempuan petani dalam penelitian ini?.

Kaijser dan Kronsell (2014) menjelaskan beberapa temuan yang mampu mempertajam kerangka pemikiran penelitian. Pertama, untuk melihat konteks

kerentanan dan ketidaksetaraan perlu menggunakan analisis persilangan (*intersectional analysis*) yang melihat berbagai aspek penentu suatu situasi. *Intersectional analysis* sendiri didefinisikan oleh David (2008) dalam tulisan Kaijser dan Kronsell sebagai analisis terhadap *intersectionality* yang melihat interaksi antara gender, ras, dan kategori sosial-politik lainnya yang hidup dalam individu, praktik sosial, pengaturan pemerintahan, ideologi kultural, dan dampak keluaran dari interaksi-interaksi tersebut dalam konteks kekuasaan. Dengan begitu, dalam menganalisis fenomena dapat menghasilkan pemahaman antara struktur dan relasi kekuasaan yang mampu merubah paradigma kerentanan dalam menghadapi krisis iklim —melalui pemahaman interseksional, temuan bahwa individu-individu dalam masyarakat tertentu terkait krisis iklim sangat tergantung pada posisi mereka dalam masyarakat, secara khusus dalam basis struktur kekuasaan (Kaijser and Kronsell, 2014). Hal tersebut semakin memperjelas bahwa pola kerentanan terhadap perempuan dan gender dalam krisis iklim terjadi dari adanya pola relasi kekuasaan yang tidak sama dalam berbagai bentuk seperti: ketidakadilan baik dalam kondisi material dan normatif, dalam struktur masyarakat dan institusi, yang dimanifestasikan ke berbagai jenis, dihidupkan, diekspresikan, dan terus diulangi melalui praktik-pratik sosial (Kaijser and Kronsell, 2014)

Kaijser and Kronsell (2014) membawakan kritik dan analisa menarik yang berargumen bahwa penelitian-penelitian lainnya terlalu berfokus kedalam satu variabel yang dapat menjelaskan relasi kekuasaan dalam menghadapi krisis iklim, namun sering gagal dalam menjelaskan bagaimana ketidaksetaraan berlangsung sangat dekat dengan fenomena ini, bahkan diperkuat oleh struktur dominasi



lainnya. Terlebih, adanya kecenderungan untuk mensimplifikasikan satu variabel aja. Sebagai contoh, aspek gender sering dijadikan jalan pintas untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan dideskripsikan sebagai kelompok yang paling rentan dan korban yang termajinalisasi tanpa menjelaskan sebab lainnya yaitu salah satunya *intersect* dengan dimensi politik kekuasaan yang berlaku pada struktur sosial wilayah tertentu termasuk peran pemerintah dalam memperkeruh kerentanan perempuan (Kaijser and Kronsell, 2014).

Terlebih, diferensiasi sosial (dalam hal ini stuktur kekuasaan) yang telah terkonstruksi memengaruhi kemampuan individu dalam memahami krisis iklim dan bagaimana cara mereka menyikapinya. Lebih lanjut, penelitian yang berjudul *Beyond dichotomies: Gender and intersecting inequalities in climate change studies* (Houria Djoudi et al., 2016), memperkuat relasi kekuasaan dan penggunaan *intersectional analysis* dalam menjelaskan kerentanan berbasis gender dalam studi krisis iklim khususnya yang telah dijelaskan oleh Anna Kaijser & Annica Kronsell (2014).

Mereka berargumen bahwa studi gender dan krisis iklim terus mengabaikan struktur ketimpangan dan relasi kekusaan berbasis gender. Menggunakan paradigma tersebut, berarti akan lebih mudah dalam menjelaskan dimensi sosial krisis iklim yang berpindah dari kategorisasi empiris (sosial) yaitu laki-laki vs. perempuan menuju *intersectional analysis* (Interaksi antara gender, ras, dan kategori sosial lainnya yang hidup dalam individu, praktik sosial, pengaturan pemerintahan, ideologi kultural, dan dampak keluaran dari interaksi-interaksi

tersebut dalam konteks kekuasaan) (Davis, 2008; Kaijser and Kronsell, 2014). Bentuk-bentuk kerentannya pada perempuan diperkuat dengan model kerentanan Goodrich et.al (2019), selanjutnya menjadi dasar peneliti mengupas kerentanan dalam *intersect* yaitu terjadi pada dimensi geografi dengan melihat bagaimana posisi perempuan petani dalam sebuah kondisi geografis. Selanjutnya menilik kondisi sosio-politik (termasuk nilai dan norma, tradisi, dan tingkat toleransi dan demokrasi) perempuan petani di dalam masyarakat. Terakhir melihat peran kuasa dan relasi sosio-ekonomi atas perubahan yang cepat serta dinamis yang memengaruhi bagaimana proses kerentanan gender hadir sebagai dampak dari krisis iklim salah satunya tingkat kemiskinan atau perekonomian perempuan petani (Houria Djoudi et al., 2016; Goodrich et al., 2019).

Dengan begitu, akan memunculkan pemahaman tentang konstruksi diskursif gender dan hubungan kekuasaan yang membentuk persepsi terhadap realita dampak krisis iklim terhadap kerentanan dan respon terhadap lingkungan, sosio-ekonomi, dan sosio-politik terutama bentuk-bentuk kerentannya pada perempuan (Houria Djoudi et al., 2016). Terlebih, menjadi urgensi yang sangat penting menyoroti melalui perseptif ini karena sejatinya pada banyak negara berkembang, perempuan turut menjadi tulang punggung bagi perekonomian keluarga. Hal ini tentunya sangat relevan dalam konteks menjadikan perempuan sebagai investasi dalam dunia agrikultur sebagai petani, nelayan, ataupun pekerja dalam pemerosesan dan pemasaran produk-produk pertanian, di sisi lain perempuan juga rentan mengalami kerugian terhadap adanya ‘investasi’ tersebut melalui proses ketidaksetaraan (Beckford and Rhiney, 2016).

Untuk memperkuat diskusi diatas, peneliti mencoba menggali kemiripan dengan konteks masyarakat dan/atau perempuan petani melalui tiga artikel jurnal. Pertama, artikel jurnal yang berjudul *Peranan Gender Dalam Adaptasi Perubahan Iklim Pada Ekosistem Pegunungan Di Kabupaten Solok, Sumatera Barat* oleh Yanto Rochmayanto & Pebriyanti Kurniasih pada tahun 2013.

Penelitian ini memaparkan pengalaman empirik perempuan petani solok terhadap krisis iklim yang berdampak dengan berubahnya pola hujan, maka peran laki-laki yang semestinya berladang dan bertani harus digantikan oleh istri, karena suami beralih mencari pekerjaan pengganti untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut berdampak pada semakin besarnya jurang perubahan peranan dalam hal produktif yang menimbulkan bentuk-bentuk ketidakadilan berupa beban ganda bagi perempuan tanpa ada insentif cukup, seperti hak menentukan dan mengatur kegiatan pertanian dan pendapatan yang masuk ke ‘kantong’ pribadi dari perempuan petani (Rochmayanto & Kurniasih, 2013).

Hal ini diperkuat dengan laporan KIARA dan *Climate Justice* dalam Rusmadi (2017) menyebutkan bahwa pada saat terpapar dampak krisis iklim, perempuan akan menanggung beban ganda, yaitu pekerjaan memenuhi kebutuhan perekonomian dan urusan domestiknya. Perempuan juga menjadi tumpuan terhadap tanggung jawab tambahan apabila pada konteks iklim kerap memunculkan anomali yang menyebabkan lahannya tidak produktif untuk menghasilkan dalam memutar perekonomian para petani maka mata pencaharian sehari-hari tidak dapat terpenuhi dan harus mencari pendapatan tambahan —tentunya menjadi beban

tambahan bagi perempuan untuk mengerjakan urusan domestiknya, khususnya perempuan petani.

Beban tersebut diperkuat dengan hasil penelitian *Down to Earth* dalam Rochmayanto dan Kurniasih (2013) yaitu menyebutkan hasil analisis terhadap bencana yang terjadi di 141 negara membuktikan bahwa perbedaan jumlah korban akibat bencana alam berkaitan erat dengan hak ekonomi dan sosial perempuan, sangat merugikan perempuan khususnya perempuan petani. Mengapa? Lagi-lagi adalah *double burden*, krisis iklim yang berdampak dengan berubahnya pola hujan.

Kedua, memahamai pengalaman empirik relasi kekuasaan dan keragaman kultur berbasis gender dalam pertanian, walaupun tidak secara spesifik penelitian ini menjelaskan keterkaitannya dengan krisis iklim. Penelitian berjudul *Akses dan Kontrol Perempuan Petani Penggarap pada Lahan Pertanian PTPN IX Kebun Merbuh* oleh Asma Luthfi pada tahun 2010, menemukan bahwa akses atau kesempatan dan kontribusi yang dimiliki perempuan dalam proses produksi dan distribusi sangat besar, tetapi tidak disertai dengan kontrol atau pemberian kewenangan yang proporsional bagi perempuan, termasuk dalam pengambilan keputusan istri cenderung tidak dilibatkan dalam menentukan atau memberi keputusan akhir pada aktivitas pertanian yang mereka lakukan. Tentu hal ini senada dengan temuan Arora-Jonsson (2011) mengenai keunggulan perempuan di India dan Swedia dimana telah dijelaskan pada poin bahasan sebelumnya.

Sehingga, implikasi yang terjadi ialah adanya subordinasi antara relasi gender petani (sebagai suami dan istri) (Luthfi, 2010). Di samping itu pada *level* domestik dan publik, istri masih harus mengalami beban ganda (*double burden*).

Dengan realita bahwa istri secara maksimal menggarap tanah pertanian, namun justru harus mendapatkan hak yang berbeda dengan yang diperoleh suaminya seperti hak sertifikasi atas akses lahan dan hak mendapat pendapatan yang setara atau lebih dimana kesemuanya hanya terpusat pada laki-laki (suami) (Luthfi, 2010). Keterkaitan tersebut mengingatkan peneliti akan dimensi sosial dalam krisis iklim yang juga sangat bisa terlihat dalam institusi lokal setempat (Villamor, Desrianti, Akiefnawati, Amaruzaman, & van Noordwijk, 2014). Praktis, terjadi ketimpangan hak dan kesempatan didalamnya yang hanya bisa dibantu oleh aturan. Sebagai contoh, jika memang diantara perempuan petani dan laki-laki telah terjadi kesepakatan atas suatu konsen seperti pembagian upah, tetapi dalam prosesnya perempuan petani tidak memiliki banyak ruang gerak baik karena beban yang ditanggung maupun akses yang didapatkan terbatas. Hal tersebut disebabkan karena ukuran kesetaraan gender tidak hanya diukur berdasarkan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan saja, kesetaraan gender juga berkaitan dengan pencapaian atau hasil yang menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara terlibat dalam *decision-making* dan proses pembangunan untuk mendapatkan keuntungan yang sama-sama menyejahterakan (Kushandajani & Alfirdaus, 2019)

Oleh karena itu, disamping laki-laki, kerentanan terhadap krisis iklim tidak dapat dilepaskan dengan fakta bahwa perempuan memegang peran penting terhadap ketangguhan rumah tangga dan masyarakat dalam upaya mitigasi dampak dan adaptasi krisis iklim. Pemenuhan terhadap kesempatan yang sama dan proses adaptasi yang seimbang pun menjadi titik fokus yang harus dipertimbangkan ketika melihat implikasi krisis iklim terhadap kerentanan gender.

Berbeda dengan temuan penelitian bertajuk *Gender Influences Decisions To Change Land Use Practices in The Tropical Forest Margins Of Jambi, Indonesia*. Perempuan tidak banyak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait alih fungsi lahan. Walaupun begitu, menggunakan metode *Role-playing Game (RPG)* pada faktanya perempuan berpotensi untuk meningkatkan potensi konversi lahan karena perempuan bertendensi untuk menerima tawaran konversi lahan untuk digunakan sebagai perkebunan sawit dan karet, hal ini menurut standar REDD+<sup>2</sup> dapat meningkatkan emisi karbon (Villamor et al., 2014)

Namun, konteks sosio-kultural yang menganut sistem matrilineal menunjukkan adanya potensi perempuan untuk ikut dalam proses negosiasi dan diskusi, hanya saja peneliti melihat masih kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai lingkungan, dimana dibenturkan dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat justru membentuk kerentanan lainnya berupa kerentanan lahan dan masa depan daya dukung lingkungan bagi kehidupan masyarakat setempat.

Setelah memahami secara seksama hasil *literature review* delapan jurnal diatas, penelitian ini hadir untuk memperkuat *thesis* dimana fenomena krisis iklim berimplikasi terhadap realita kerentanan berbasis gender dan relasi kuasa yang tidak seimbang dan berkeadilan. Mengingat kurangnya penelitian serupa di Indonesia maka penelitian ini juga sebagai alternatif dalam melihat dimensi sosial sebagai spektrum untuk menjelaskan *thesis* diatas —peneliti meyakini keberadaannya relevan pada konteks dan lokasi penelitian yang hendak diteliti.

---

<sup>2</sup> Sebuah *framework* mitigasi bencana yang disepakati oleh forum tingkat tinggi untuk perubahan Iklim PBB yang diadakan di Bali, Indonesia tahun 2007 bernama *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REED+)*

Namun, perlu disadari konsep krisis iklim memang masih belum dipahami hingga tingkatan akar rumput, tetapi peneliti berkeyakinan bahwa relasi kuasa berbasis gender sebagai dampak dari krisis iklim dapat berada dimana saja dengan bentuk yang berbeda-beda sesuai praktik-praktik empiris yang dialami oleh perempuan petani tidak terkecuali di lokasi penelitian yaitu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Melihat adanya signifikansi kerentanan perempuan pada proses adaptasi krisis iklim dan adanya relasi kuasa yang kompleks serta melihat hadirnya urgensi besar, maka menjadi landasan kuat untuk dilakukannya penelitian ini.

Pertama, besarnya pengaruh konstruksi dan diferensiasi sosial pada lokasi tertentu berakibat tumbuhnya relasi kuasa yang merugikan (dalam konteks penelitian ini digambarkan dengan ketidakadilan dan kerentanan gender bagi perempuan petani dalam menghadapi situasi krisis iklim)

Kedua, berangkat dengan kurangnya akses informasi dan partisipasi perempuan terhadap krisis iklim yang menyebabkan tidak adanya pengetahuan yang cukup untuk melihat krisis iklim kedalam konteks lokal, hal ini terjadi tidak hanya pada perempuan namun dalam beberapa daerah juga dialami oleh laki-laki

Ketiga, minimnya perspektif *gender mainstreaming* (PUG) yang melembaga (jika ada *assessment*-nya kebanyakan kurang tepat sasaran) dimana memproduksi kebijakan berbasis gender dalam adaptasi krisis iklim, bahkan krisis iklim itu sendiri kurang dikenal sebagai *policy support* khususnya di daerah perdesaan dan pertanian.

Dengan paparan diatas peneliti membawa satu daerah perdesaan di daerah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dimana subjek penelitian berada yaitu mengambil pengalaman perempuan petani di sana. Secara geomorfologi daerah ini terpengaruh iklim pegunungan yang berada pada kaki Gunung Lawu berada pada ketinggian 403 mdpl (Badan Pusat Statistik (BPS), 2018). Tepatnya pada Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang, hal ini didasarkan pada lansiran berita oleh TribunSolo.com yang dikonfirmasi oleh laporan perubahan iklim oleh Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan terjadi peningkatan suhu dan curah hujan yang berkurang, dimana pertanggal 2 September 2019 yaitu seluas 300 hektare lahan pertanian milik warga Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten [Karanganyar](#) dibiarkan 'menganggur' karena musim kemarau yang berkepanjangan dengan sungai dan saluran irigasi di lahan tersebut mengalami kekeringan<sup>3</sup>.

Pemilihan wilayah tersebut senada dengan penelitian oleh Pusat Studi Pariwisata UGM dengan beberapa aspek kawasan pegunungan yang mempunyai nilai strategis sebagai indikator krisis iklim, sehingga kegagalan dinamika iklim akan berdampak serius bagi sektor terkait di ekosistem sekitar seperti kehutanan dan pertanian (Rochmayanto & Kurniasih, 2013)

Lalu beralih pada proporsi penduduk Kabupaten Karanganyar yang berprofesi dalam bidang pertanian sebesar 24% dari keseluruhan jumlah penduduk. Ditambah, di Kecamatan Mojogedang sendiri memiliki peta demografi berdasarkan

---

<sup>3</sup> <https://solo.tribunnews.com/2019/09/02/kemarau-panjang-ratusan-hektare-lahan-pertanian-di-karanganyar-menganggur>



jenis kelamin dimana laki-laki dan perempuan masing-masing 30.846 dan 31.310, dan secara akumulasi tingkat kemiskinan sebesar 12% yang termasuk jajaran atas di Jawa Tengah (BPS, 2018). Namun, pada faktanya data ini harus diperinci melalui penelitian lapangan. Peneliti berargumen bahwa potensi kerentanan yang didasarkan fenomena kekeringan ini relevan dengan tema besar penelitian yang diteliti, dengan tingkat kemiskinan, pekerjaan sebagai petani, konteks krisis iklim, dan proporsi gender berpotensi tinggi terjadinya kerentanan berbasis gender dalam menghadapi krisis iklim.

Mengetahui pentingnya permasalahan ini berdasarkan uraian diatas terutama terkait krisis iklim dan kerentanan gender yang terjadi di Kecamatan Mojogedang, maka peneliti kemudian tertarik dan menyusun strategi penelitian kualitatif untuk melakukan penelitian dengan judul ‘Krisis Iklim, Gender, dan Kerentanan: Potret Perempuan Petani Di Kabupaten Karangayar, Jawa Tengah’.

## **1.2 Rumusan masalah**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai:

1. Bagaimana kerentanan gender dalam krisis iklim terjadi pada perempuan petani di Kabupaten Karangayar, Jawa Tengah?
2. Bagaimana relasi kuasa dapat menjelaskan kerentanan gender sebagai akibat krisis iklim pada perempuan petani di Kabupaten Karangayar, Jawa Tengah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Menilik dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk memperkuat *thesis* dimana mengerucut pada fenomena krisis iklim berimplikasi terhadap kerentanan gender —yaitu relasi kuasa yang tidak seimbang dan tidak

berkeadilan didalamnya. Walaupun begitu, peneliti menggali dan menemukan beberapa celah pada beberapa *existing study* mengenai diskursus ini. Memang benar, hasil-hasil studi yang ada sudah menjelaskan berbagai macam dan cukup menjelaskan keterkaitan dampak krisis iklim dengan kerentanan gender.

Namun, terlihat jelas masih minimnya penelitian topik krisis iklim dalam basis kerentanan gender yang mengeksaminasi masyarakat pertanian khususnya perempuan petani di Indonesia secara komprehensif. Hal ini menilik dari adanya beberapa *missing-link* analisis studi diatas seperti yang dijelaskan oleh (Goodrich et al., 2019) terdapat dua proses analisis yaitu hanya mensimplifikasi atau hanya berhenti sampai faktor gender yang membedakan kesenjangan perempuan dan laki-laki tanpa melihat *intersectionality* dan bahkan hanya melakukan analisis *intersectionality* pada struktur sosial tanpa dibersamai dengan paradigma sosial ekonomi, dan, politik yang dinamis, sehingga hasil yang didapatkan cenderung sangat *general*, yang berisiko untuk terjadi *miss* multidimensi dalam melihat dampak dan implikasi kerentanan gender dalam kelompok masyarakat yang berbeda.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir ditujukan untuk mengubungkan perspektif *intersectionality* dan *socio-economic drivers of change* dalam memahami dampak krisis iklim dan kerentanan gender pada praktik-praktik empiris yang dialami oleh perempuan petani khususnya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Tujuan diatas didasarkan oleh beberapa hasil studi literatur sebagai berikut. Anna Kaijser & Annica Kronsell (2014) menjelaskan temuan yang mampu

mempertajam temuan teoritis dengan menggunakan analisis interseksional menggambarkan bahwa pola kerentanan terhadap perempuan dan gender dalam krisis iklim terjadi dari adanya pola hubungan kekuasaan dalam berbagai bentuk. Penelitian ini lebih lanjut, menghasilkan pemahaman antara struktur dan relasi kekuasaan, dimana mampu merubah paradigma kerentanan dalam menghadapi krisis iklim. Hal tersebut diperkuat dengan relasi kekuasaan dan penggunaan *intersectional analysis* dalam menghasilkan pemahaman tentang konstruksi diskursif gender dan hubungan kekuasaan yang membentuk persepsi terhadap realita dampak krisis iklim terhadap kerentanan dan respon terhadap lingkungan, sosiologi, ekonomi dan politik. Senada dengan konsep diatas studi kerentanan perempuan dalam krisis iklim menunjukkan sorotan terhadap kerentanan sosial berbasis gender yang terjadi pada perempuan dalam krisis iklim, laki-laki dan perempuan menghadapinya sesuai dengan kondisi internal dan konstruksi sosial yang ada (Arora-Jonsson, 2011; Houria Djoudi et al., 2016; Goodrich et al., 2019; Terry, 2009a).

Pada gambaran empiris dilapangan, beberapa artikel jurnal menyatakan krisis iklim berdampak pada semakin besarnya krisis peranan dalam hal peranan produktif dan domestik tersebut menimbulkan bentuk-bentuk ketidakadilan berupa beban ganda bagi perempuan tanpa diikuti dengan hak-hak demokratis perempuan seperti akses sumberdaya pertanian dan legal lahan yang berdampak pada subordinasi posisi perempuan dalam tingkatan mikro dan makro yang disuburkan dengan adanya norma dan struktur sosial berbasis gender.

Hal tersebut terjadi seolah mengagungkan posisi laki-laki tanpa melihat beban kerja perempuan yang dikarena beberapa faktor seperti norma gender dalam rumah tangga; struktur dan peran sosial; mobilisasi pergerakan sosial-ekonomi; etnis, suku, usia, agama; biofisik sehingga menimbulkan beberapa implikasi gender yang merugikan seperti ketertinggalan akses kapasitas perempuan; kemerdekaan dalam memperoleh pendapatan; beban ganda; sampai hilangnya hak-hak perempuan dalam memenuhi kebutuhan individunya yang diperburuk dampak krisis iklim khususnya di daerah pertanian (Arora-Jonsson, 2011; Goodrich et al., 2019; Luthfi, 2010; MacGregor, 2010; Mamaril & Lu, 2019; Rochmayanto & Kurniasih, 2013; Villamor et al., 2014)

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan secara menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang telah diajukan, yaitu menjelaskan kerentanan hasil dari krisis iklim terhadap perempuan petani di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang dilihat melalui pendekatan relasi kuasa untuk memahami secara komprehensif. Mengingat terbatasnya literatur serupa dengan penelitian ini, kemudian juga tujuannya untuk mengetahui dampaknya krisis iklim dengan pendekatan *intersectional analysis* yang dapat menjadi model analisis dengan konteks atau diferensiasi sosial yang berbeda pada wilayah lain.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan atau dunia akademis dalam melihat sebuah fenomena krisis iklim dan kerentanan perempuan, serta relasi kuasanya, secara khusus mengenai kerentanan perempuan petani terhadap krisis iklim di Indonesia. Terakhir, mampu menyajikan referensi

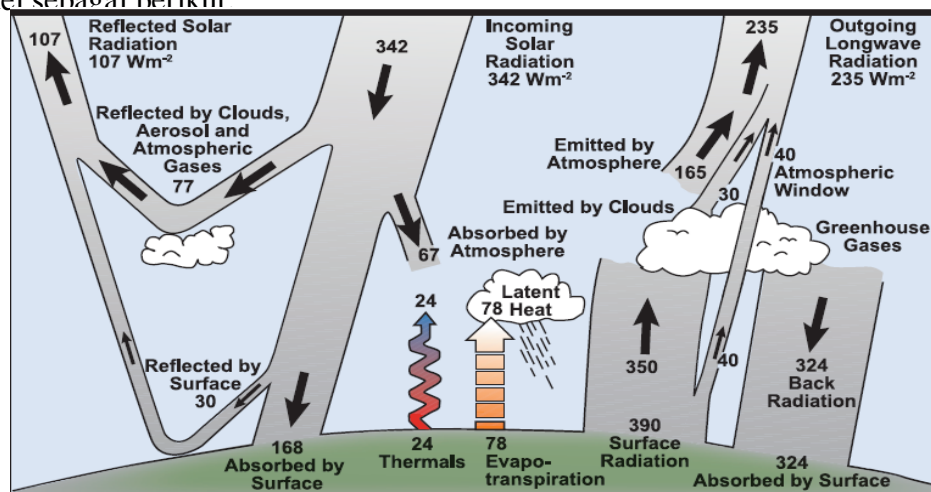
baru bagi masyarakat luas agar dapat lebih adaptif dan serius dalam menanggapi krisis iklim global kedalam konteks lokal, sehingga tidak terjadi sebuah fenomena yang secara signifikan merugikan kelompok satu sama lain. Sekaligus sebagai kontributor bagi pembuat dan pengambil kebijakan adaptasi krisis iklim agar memberikan atensi lebih terhadap perspektif gender dalam membuat program dan kebijakan terkait dengan krisis iklim di bidang agrikultur dan masyarakat petani.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Krisis Iklim**

Dalam melihat fenomena krisis iklim, tidak lepas dari teori yang menggunakan terminologi sebelumnya yaitu perubahan iklim adalah sebuah perubahan atau pergantian pada iklim suatu lokasi, wilayah, dan planet secara spesifik, dimana bergantian tersebut diukur melalui fenomena yang terasosiasi dengan rerata cuaca, seperti fluktuativnya temperatur, pola angin, dan hujan yang menimbulkan ketidakpastian iklim global dan lebih lanjut memengaruhi dan menjadi tantangan untuk segala yang terdampak olehnya. Selanjutnya pada penjelasan teori krisis iklim ini akan banyak menggunakan terminologi perubahan iklim, *The UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* menggunakan kata ‘*Climate Change*’ untuk mendefinisikan secara spesifik iklim yang disebabkan oleh perubahan aktivitas manusia dan ‘*climate variability*’ (varibilitas iklim) untuk keadaan perubahan alam atau lainnya (Adhikari, Shah, Baral, & Khanal, 2011; Le Treut, Cubasch, & Allen, 2007)

Untuk lebih memperdalam pemahaman terkait perubahan iklim, maka perlu memperhatikan salah satu model teori perubahan iklim diatas dengan ilustrasi model sebagai berikut:



Gambar 1.1. Model Faktor Determinan Perubahan Iklim oleh Kiehl and Trenberth (1997) dalam Le Treut, Cubasch, & Allen (2007)

Dalam penjelasan jurnal *Historical Overview of Climate Change Science* (2007)<sup>4</sup> mendefinisikan sebuah iklim tentu akan merujuk pada keadaan rerata iklim dan variabilitasnya yang dihitung dari temperatur, hujan, dan angin selama periode waktu tertentu (selama beberapa bulan, dekade, abad, hingga jutaan tahun). Sistem iklim juga dijelaskan sebagai sebuah kekuatan yang terus berkembang dibawah pengaruh dinamika *forcing* internal dan faktor-faktor eksternal yang berdampak pada iklim<sup>5</sup>. *External forcings* termasuk fenomena alam seperti erupsi gunung berapi dan variasi efek matahari, setara dengan efek campur tangan manusia dalam merubah komposisi atmosfer —memengaruhi posisi radiasi matahari yang

<sup>4</sup> Le Treut, H., R. Somerville, U. Cubasch, Y. Ding, C. Mauritzen, A. Mokssit, T. Peterson and M. Prather, 2007: Historical Overview of Climate Change. In: *Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

<sup>5</sup> Ibid., Hal. 97 (Istilah "*forcing*" merujuk pada pengertian gaya/kekuatan yang berasal dari eksternal dan/atau internal memengaruhi perubahan iklim)

memperkuat sistem iklim yang ada. Perubahan Iklim dapat terjadi selama proses-proses alamiah maupun tekanan eksternal yang telah disebutkan diatas dan/atau dorongan dari perubahan aktivitas manusia (*anthropogenic*) dalam komposisi atmosfer atau dalam penggunaan lahan. Hal ini membuktikan bahwa iklim juga berkorelasi secara langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas manusia yang merubah tatanan komposisi atmosfer global, ditambah adanya komparasi dengan keadaan *climate variability* yang terjadi pada periode waktu tertentu.

Peneliti mengacu pada buku karya Archer dan Rahmstofs (2010) berjudul *The Climate Crisis: The Introductory Guide To Climate Change*. Terdapat beberapa faktor perubahan iklim yang memang disebabkan oleh aktivitas manusia (aerosol, albedo permukaan tanah, efek contrail pesawat terbang) dan non-aktivitas manusia (intensitas sinar matahari dan efek gunung berapi). Seperti yang telah dijelaskan pada gambar 1.1, aktivitas *radiative forcing or climate forcing* yang menjadi faktor determinan penyebab ketidakseimbangan radiasi yang diabsorpsi dan radiasi energi yang dikembalikan lagi ke angkasa —menyebabkan fenomena perubahan terhadap cuaca, iklim, dan keadaan alamiah secara global.

Praktis, uraian diatas telah menempatkan faktor penyebab perubahan iklim adalah proses alamiah alam. Namun, pada diskusi ini terjadinya ketidak seimbangannya energi yang berubah juga dipengaruhi oleh keterlibatan aktivitas manusia (*anthropogenic*). Senada dengan hal tersebut, konsep *anthropocene* menjelaskan adanya hubungan antara perubahan iklim sebagai implikasi aktivitas manusia.

*Anthropocene epoch* pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan atmosferik sebagai sebutan untuk menamai masa geologi bumi yang masuk pada tahun 1800 ditandai dengan revolusi industri dan semakin masifnya penemuan-penemuan teknologi mutakhir. Hal ini dicirikan dengan manusia dan kemanusiaan mengambil peran penentu dalam tatanan geologi dan ekologi planet Bumi, dimana peran aktivitas manusia yang menjadi lawan bagi keberlangsung alam dan menekan Bumi dalam sebuah ketidakpastian (Clark, 2015).

*Anthropocene* merepresentasikan fase baru dalam sejarah umat manusia dan Bumi, dimana kedua kekuatan alam dan manusia saling bersinggungan sehingga terjadi keadaan nasib satu akan menentukan nasib yang lainnya (Zalasiewicz, Williams, Steffen, & Crutzen, 2010). Dalam bukunya *Ecocriticism on the Edge: The Anthropocene as a threshold Concept* dijelaskan oleh Clark (2015) bahwa akselerasi perubahan manusia telah hadir semenjak 1945 dimana seluruh biosfer mencapai intensitas ketidakpastian yang berbahaya. Banyaknya aktivitas manusia yang memengaruhi lingkungan seperti perubahan iklim, *ocean acidification*, efek ledakan populasi, deforestasi, erosi, *overfishing* dan tindakan yang mengakselerasi degradasi ekologi lainnya. Dalam hal ini, konteks pendekatan penyebab terjadinya perubahan iklim pada masa *anthropocene* bergeser pada konteks baru dan *demands* seperti isu kultural, estetika, filosofi, dan politik dalam lingkungan yang termanifestasikan kedalam masalah-masalah diatas (Staley, 2017). Seperti pada diskusi di bagian latar belakang, pada masa modern ini, *Anthropocene* dapat merepresentasikan sebuah relasi kuasa yang timpang dan tidak terkontrol dari pemilik kuasa atas sumber daya—yaitu direpresentasikan dengan kuasa pemerintah.



Ketimpangan juga hadir dalam struktur sosial non-institusional yang dilakukan oleh subjek di masyarakat melalui relasi kuasa antara yang mampu memengaruhi sumber daya atas yang lainnya (Avelino & Rotmans, 2009; Bălan, 2009; Zalasiewicz et al., 2010). Sayangnya, ketimpangan kuasa tersebut makin diperburuk dengan gagalnya struktur kuasa tersebut melindungi hak-hak atas kelompok lain termasuk perempuan dan kelompok berpenghasilan rendah atau miskin.

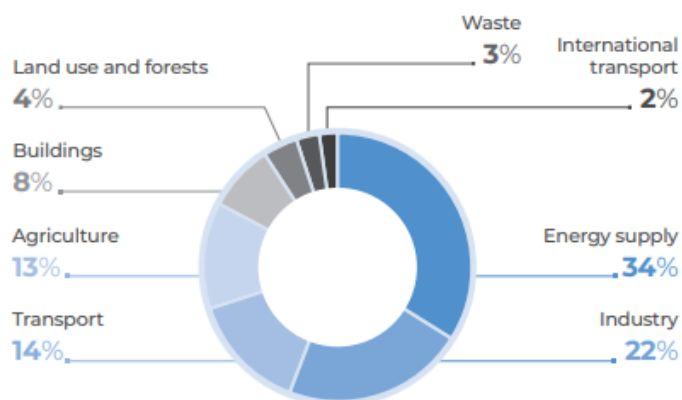
*Anthropocene*, dewasa ini juga merepresentasikan meluasnya kuasa kapitalisme yang tidak terkontrol. Bagai ‘sihir’ kapitalisme berkerja dan diterima secara global tetapi secara bersamaan mampu bersifat destruktif yang berakibat menimbulkan efek polusi, deforestasi, dan pembalakan, telah mencapai ambang penghancuran diri bagi manusia (Tobias Menely dan Margaret Ronda dalam Clark, 2015). Dengan begitu modernitas dan kapitalisme global yang tidak terkontrol memberikan sumbangsih besar terhadap ketidakpastian ekologi, dan mulai menuju konkursi terjadap kejahatan agen-agen dalam kapitalisme sebagai tindakan kejahatan pada lingkungan. Termasuk sumbangan terhadap konsentrasi emisi gas-gas rumah kaca dan juga aerosol sulfat yang dihasilkan dari aktivitas manusia khususnya pemakaian bahan bakar fosil —didorong oleh aktivitas ekspansi kapitalisme global sejak revolusi industrialisasi, kegiatan agrikultur skala besar, dan pembajakan lahan dan hutan (Hamidi, 2010). Lihat gambar 1.3.

Bahkan Slavoj Žižek dalam Clark menyebutkan *anthropogenic* dalam perubahan iklim sejatinya merupakan topeng bagi agenda kapitalisme global sesungguhnya. Hubungan relasi kuasa berbasis kapitalisme yang instutsionalis dan

tidak sangat erat dengan fenomena krisis iklim yang masuk kedalam *human-cause effects* —terkait dengan hasil tatanan energi di atmosfer dan penggunaan lahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

*Anthropocene* terbiaskan, apabila diartikan hanya sekadar hidupnya ‘masa keagungan manusia modern’ sama halnya dengan pemahaman krisis iklim yang disempitkan sebatas pengertian teknis sebagai masalah utama. Padahal permasalahan utama yang dibentuk pada era ini adalah industrialisasi akibat kapitalisme; konsumerisme kompleks yang dengan rakusnya mengeksploitasi Bumi; *overproduction*; dan perihal sampah —layaknya tangan anak kecil, menerima apapun sebagai pemberian tanpa melihat tantangan yang akan dihadapi kedepan (Crist, 2007).

**Global greenhouse gas emissions by sector in 2016**



**Gambar 1.2.** Kontribusi emisi dari beberapa sektor secara global (UNFCC, 2019)

Dengan demikian, eratnya hubungan bumi dan aktivitas manusia dinilai sebagai pembentuk realitas krisis iklim dalam arti buruk —tanpa pemahaman ideologis yang benar terhadap pengelolaan Bumi itu sendiri dan kontrol atas kuasa negara dan subjek yang berkuasa sehingga diskusi mengenai dampak krisis iklim sesungguhnya sedang berdiskusi tentang bagaimana krisis iklim terjadi sebagai

dampak dari adanya relasi kuasa yang timpang —mempunyai hubungan sebab akibat dimana merugikan dapat merugikan suatu kelompok.

#### **1.5.1.1 Krisis Iklim Sebagai Urgensi Global**

Realitas ini makin disadari oleh masyarakat dunia, implikasi krisis iklim yang disebabkan oleh kondisi komposisi atmosferik dan klimatologis diatas menimbulkan berbagai gejala-gejala luar biasa yang bervariasi diseluruh belahan dunia. Agenda global dalam krisis iklim sudah terbentuk sedari lama, sejak terbentuknya *Intergovernmental Panel on Climate Change* pada tahun 1988 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk menyajikan data saintifik dalam segala tingkatan sebagai acuan pembuatan kebijakan tentang kebijakan iklim, dimana sampai sekarang sudah mencapai pelaporannya yang kelima (*assessment report*) perubahan iklim. Pada tahun 1992, terbentuk *The United Nations Framework Convention on Climate Change* atau KTT Hijau di Rio berasal dari kesadaran masyarakat global akan perlunya aksi nyata pada penyelamatan iklim dengan menstabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang memengaruhi keseimbangan sistem iklim.

Lalu ditindak lanjuti dengan adanya Kyoto Protocol tahun 1997, demi membentuk kesepakatan internasional dalam mereduksi emisi pada negara-negara industri. Dan komitmen kedua pada tahun 2012 di Amandemen Doha disepakati untuk berlaku sampai 2020. Hal ini kemudian diadaptasi pada perjanjian terbaru yaitu *The Paris Agreement* pada 2015, dimana pemerintahan seluruh dunia meratifikasi komitmen global untuk menurunkan dan membatasi produksi emisi yang mempertahankan suhu global pada 2 °C dan/atau dapat mencapai batasan di

bawah 1.5 °C, dengan cara membangun adaptasi dan ketangguhan serta pembangunan berbasis iklim yang rendah emisi (UNCCS, 2019; UNFCC, 2019). Terlebih kerangka pikir global ini dikuatkan dengan agenda post 2015 (*Millineum Development Goals*) yaitu *Sustainable Developmet Goals (SDGs)* dalam tujuan nomor 13-nya yang berisi seperangkat konsensus, target, dan indikator terhadap bagaimana cara untuk mengambil tindakan cepat dalam permasalahan krisis iklim beserta adaptasi dampaknya.

Kendati begitu, parahnya krisis iklim bukan hanya berbicara mengenai fenomena pemanasan global (*global heating*) saja, namun efek global yang diakibatkan oleh perubahan atmosferik menjadi urgensi, terutama bagi produksi dan ketahanan pangan di dunia pertanian. Menurut Archer dan Rahmstorf (2010), banyak wilayah yang menunjukkan kenaikan dalam jumlah hari-hari dengan hujan yang ekstrim. Disisi lain, kekeringan menjadi momok yang terus meningkat di beberapa bagian dunia. Palmer Drought Severity Index menunjukan kekeringan yang berlipat ganda dan meluas secara global sejak 1970, fenomena tersebut lebih lanjut didiskusikan pada pembahasan berikut.

Hal diatas terjadi karena anomali iklim dunia yang telah menjadi krisis dan berubah, perubahan sirkulasi atmosferik dalam beberapa tahun didominasi beragamnya pola osilasi (*pergerakan*) antara El Nino (yang dicirikan dengan kondisi hangat di bagian timur garis tropis pasifik) dan kondisi sebaliknya yang bernama La Nina. Namun, kondisi osilasi yang alamiah sudah hilang bertahun-tahun, lalu berdampak timbul pergerakan panas samudera yaitu *El Nino/Southern Oscillation (ENSO) phenomenon*. Fenomena anomali ini menyebabkan udara basah

di kawasan barat Pasifik seperti Peru dan California tetapi kekeringan di Indonesia, Australia, Amazon, dan sedikit bagian Afrika dimana pada waktu osilasi tertentu. Alih-alih musim kemarau tanam di Indonesia, justru karena krisis iklim tidak terjadi demikian. Namun, peneliti masih banyak yang pekerjaan untuk meneliti mengenai keadaan krisis iklim dihubungkan langsung dengan anomali osilasi ini dengan krisis iklim, terutama bukti-bukti yang menunjukkan bukti aktivitas manusialah yang berkontribusi dalam krisis iklim (salah satunya adalah laporan dari IPCC tahun 2013).

Dampak *El Nino/Southern Oscillation (ENSO) phenomenon* terhadap krisis iklim yang dieksaminasi nampaknya semakin memperkuat adanya gelombang krisis iklim global seperti pola sirkulasi yang berbuah pada *the Pacific Decadal Oscillation (PDO)*, *the Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO)*, *the North Atlantic Oscillation (NAO)*, dan *the Southern Annular Mode (SAM)*. Hal ini semakin memperkuat prediksi di masa depan terhadap kerusakan yang semakin buruk akibat perubahan global. El Niño sendiri telah diprediksi sebelumnya, dan beberapa negara telah mengambil langkah sigap untuk menyelamatkan dampak buruknya, termasuk jutaan dolar yang akan terbuang dengan kerusakan agrikultur (Archer dan Rahmstorf, 2010). Dengan demikian, krisis iklim dan kontribusinya dalam dunia pertanian dan hasil alam lainnya sangat berpengaruh, tidak sedikit negara yang telah membangun sistem mitigasi, adaptasi, dan kesadaran. Sebaliknya, banyak juga wilayah di beberapa negara yang belum menjadikan hal ini sebagai konsen untuk menyelamatkan berbagai kehidupan dan penghidupan masyarakatnya, termasuk di Indonesia.

Dibalik gemerlap penjelasan teknis diatas, krisis iklim dalam pertanian berperan sentral. Walau begitu ada aspek yang sering kali tidak didengarkan. Ketahanan atas kerentanan masyarakat sebelum, selama, dan setelah menghadapi krisis iklim harus dimasukkan kedalam hitungan. Terdapat kelompok rentan seperti perempuan dalam kelompok yang terpinggirkan yang pada konteks khusus memerlukan diskusi lebih dalam. Oleh karena itu, krisis iklim dalam aspek gender akan didiskusikan melalui analisis gender pada sub pembahasan berikutnya.

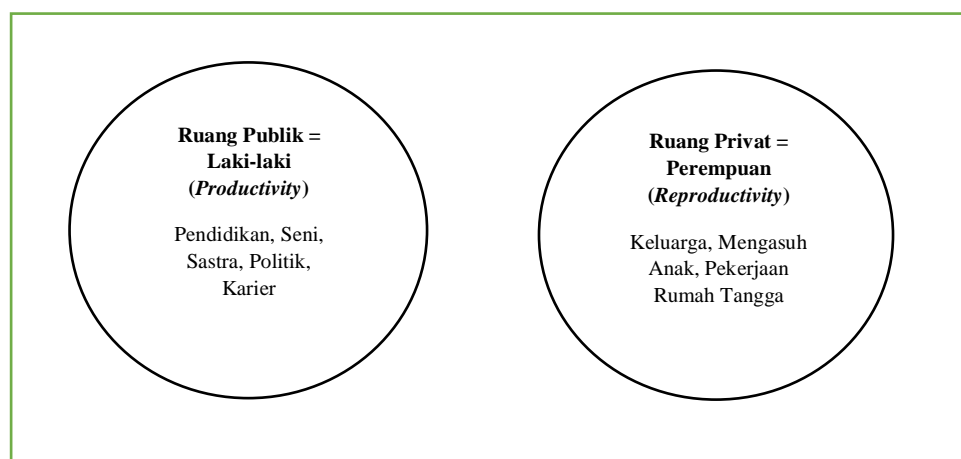
## **1.5.2 Krisis Iklim dalam Analisis Gender**

### **1.5.2.1 Teori Perspektif Gender Dan Interseksionalitas**

Seiring gentingnya permasalahan krisis iklim, studi-studi krisis iklim seolah menjamur dan menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Walaupun begitu, keberadaan studi krisis atau perubahan iklim kerap dilihat dan didominasi sebagai permasalahan teknis yang membutuhkan solusi teknis pula. Faktanya, banyak dari aspek sosial dan politik yang harus masuk dalam perhitungan, termasuk aspek gender (Dankelman, 2002). Berbicara tentang aspek dan analisis gender serta kesetaraannya tidak akan lepas dengan pendekatan atau paradigma feminisme —yang berusaha untuk menghilangkan hubungan politik diantara dua gender —supremasi kaum laki-laki dan supresi kaum perempuan di hampir semua masyarakat (Heywood, 2012).

Lebih lanjut pada studi feminisme dan gender, Elstahn dalam Heywood (2012) menjelaskan bahwa feminisme berusaha untuk mendefinisikan ulang pengertian ‘laki-laki publik’ dan ‘perempuan pribadi’ dan menghilangkan hubungan politik yang dimana sekelompok orang dikontrol orang lain dalam hal ini

perempuan dianggap sebagai kelompok yang harus tunduk pada kuasa laki-laki secara ‘alamiah’ bukan secara ‘politik’. Sehingga feminisme secara langsung hadir dalam menentang patriarki, seksisme, dan menuntut kesetaraan<sup>6</sup>



*Gambar 1. 3 Pembagian Kerja Gendered-Based (Heywood, 2016; Mamaril dan Lu, 2019)*

Namun, paradigma di atas tidak cukup menempatkan gender sebagai satu-satunya aspek dalam feminisme. Feminisme menentang dan menghilangkan struktur sosial yang berusaha menempatkan perempuan dalam posisi tidak menguntungkan hanya karena jenis kelaminnya. Namun, terjadinya proses tersebut hadir mempertimbangkan konsekuensi dari aspek-aspek lainnya, seperti identitas, perbedaan-perbedaan dan kerugian-kerugian sosial ekonomi (Henry, Henry, & Lanier, 2018; Nicole M. Else-Quest, 2019). Kontekstualisme dari persoalan perempuan-perempuan dalam perspektif gender dan interseksionalitasnya ditentukan dengan situasi mereka masing-masing yang berbeda satu sama lain,

<sup>6</sup> Patriarki adalah “diperintah ayah” menjelaskan dominasi laki-laki menundukan perempuan; seksisme adalah ide yang menyangka keadaan biologis sebagai takdir yang berusaha ditentang dengan menarik pemisahan tegas antara “gender” dan “jenis kelamin/seks” (Heywood, 2016: p.380-390)

seperti aspek sosial ekonomi perempuan terdapat kondisi yang berbeda tergantung dari tingkat kekayaan (*advantages*) dan kemiskinan (*disadvantages*).

Jika ditarik kembali pada konteks krisis iklim dalam analisis gender, analisis interseksi dalam gender dan krisis iklim dinilai mampu menjawab pertanyaan besar —apakah krisis iklim berdiri pada posisi netral terhadap gender? Pada kenyataannya, krisis iklim tidak menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang sama. Banyak kasus, masyarakat berinteraksi dengan keadaan lingkungannya melalui diferensiasi gender yang berbeda-beda. Dalam analisis gender, perempuan berada pada kondisi yang tidak menguntungkan akibat ketidaksetaraan distribusi kesejahteraan dan kekuasaan sebagai penyebab utama, berdampak pada cara menghadapi krisis iklim secara langsung dengan lingkungan sekitarnya sekaligus secara tidak proporsional terdampak oleh adanya degradasi lingkungan (Dankelman, 2002).

Selain itu, analisis gender dalam krisis iklim dan interseksinya tidak berhenti menjadikan perempuan sebagai fokus utama saja, ia menjelaskan konteks konstruksi hegemoni dari maskulinitas dan feminisme yang secara spesifik berkaitan dengan relasi kuasa berbasis gender. Diskursus antara krisis iklim dan gender masih menyangkut tentang *stereotype* ‘maskulinitas’, teknologi baru, instrumen-instrumen ekonomi berskala besar, dan modeling kompleks komputer. Namun hal-hal diatas dari segi sosial masih belum menempatkan proporsi gender sebagai konsen utamanya (Terry, 2009b). Padahal perempuan dinilai masih banyak tertinggal dan belum dapat beradaptasi. Lalu, konsep hegemoni maskulinitas dan feminitas sendiri diartikan secara khusus melalui konsep kelaki-lakian dan



keperempuanan yang dominan dalam suatu hubungan gender pada waktu yang khusus, dalam hubungan lainnya konseptualisasi gender dapat dilihat dari adanya kaum yang ter subordinasi dan termarginalisasi atau dijadikan sasaran kejahatan (Bretherton, 2003 dalam Macgregor, 2010: 229).

Menarik jika melihat konsep subordinasi, alienasi, dan marginalisasi berbasis gender diatas yang pada faktanya berimplikasi pada konsep *double burden* dimana pada umumnya perempuan memunyai pekerjaan ‘domestik’ sedangkan laki-laki mengurus pekerjaan ‘eksternal’ (seringkali kegiatan ekonomi) (lihat gambar 1.4). Dalam konteks krisis iklim yang mengganggu siklus iklim global secara lokal khususnya di daerah pertanian, perempuan yang berusaha menggantungkan hidupnya dengan hasil tani ditambah berperan sebagai ibu yang mengurus pekerjaan domestik, praktis akan mengalami ‘beban ganda’ (Mamaril & Lu, 2019). Dimana perempuan akan cenderung menambah alokasi jam pekerjaan mereka untuk membantu ekonomi keluarga dengan alternatif-alternatif pekerjaan lainnya diluar pertanian tanpa dibayar, terjadilah *double burden* —bahkan mampu mencapai tingkat *triple burden* (bertani, pekerjaan sampingan, dan pekerjaan domestik).

Mirisnya, segregasi peran gender yang masih terjadi dan menimbulkan subordinasi didalamnya maka pekerjaan perempuan akan terus jarang dilihat, dibandingkan dengan suami, melainkan hanya sebagai orang kedua yang membantu suami (kepala keluarga yang mengarahkan dan memiliki ‘kuasa’ dalam menghidupi keluarga) saja tanpa mendapatkan hak-hak sebagai seorang manusia pekerja (Mamaril & Lu, 2019). Akibatnya, terjadi kesenjangan yang berasal dari

ketidaksetaraan gender dan ketidakdayaan perempuan atas laki-laki karena struktur sosial.

Sehingga, pada dasarnya ketidaksetaraan gender dalam krisis iklim disebabkan adanya akses terbatas bagi perempuan dibandingkan akses yang didapatkan laki-laki seperti kepemilikan lahan, kredit, dan informasi serta peran sosialnya. Hal ini diperburuk dengan segala keterbatasan interseksionalitas masing-masing perempuan, jika semakin miskin atau berada pada keadaan yang sangat tidak menguntungkan maka relasi antar gendernya akan semakin buruk saja.

#### **1.5.2.2 Konsep Kekuasaan dan Relasinya Dalam Analisis Gender dan Kerentanan**

Dengan melihat konsep analisis gender diatas tentu menggambarkan bagaimana kekuasaan menjadi konsep yang dinilai berperan banyak bagi kondisi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki baik pada tingkatan mikro maupun makro. Namun, bagaimana kuasa itu berjalan? Relasi seperti apa yang terjadi? Dan bagaimana perempuan dapat mengalami berbagai kerentanan dan paling dirugikan atas relasi ini?

Sebelum mempertebal garis diskusi analisis relasi kuasa dan gender, peneliti mencoba memberi pijakan mengenai kekuasaan (*power*), Bălan (2009) menjelaskan terdapat setidaknya dua kunci dalam memahami bentuk berjalannya kekuasaan. Pertama, pengertian bahwa kekuasaan adalah sebuah sistem, jaringan dari relasi-relasi dimana mencakup seluruh masyarakat daripada sebatas sebuah relasi antara pelaku operasi dan yang teroperasi. Kedua, Individu-individu tidak hanya berperan sebagai objek dari kekuasaan, tetapi mereka adalah *locus* dimana

kekuasaan dan resistensi digunakan —menjadi sebuah alasan dimana kekuasaan berada disana lah pula terdapat resistensi.

Dengan begitu kekuasaan menjadi sebuah strategi yang dapat dimiliki oleh siapa saja sebagai subjek pengguna kekuasaan, beserta relasi-realsi yang saling berubah-ubah dalam seluruh komponen masyarakat termasuk hubungan keluarga, di dalam institusi, dan administrasi (Foucault, 1980). Oleh karena itu kekuasaan menjadi sesuatu yang ‘elastis’ yaitu tidak terpaku pada kesatuan dominasi yang mutlak pada kelompok masyarakat tertentu.

Setelah mengerti dimana jantung kekuasaan dapat digerakan, lebih lanjut perlu peneliti diskusikan kembali bagaimana kekuasaan sejatinya dipandang, mengambil definisi kekuasaan Parson dalam Avelino and Rotmans (2009) adalah sebagai sebuah kemampuan aktor-aktor untuk memobilisasi sumber daya (Sumber daya manusia, aset-aset, modal atau material, mental, moneter, artefaktual, dan sumber daya alam) agar mencapai tujuan tertentu. Namun, menarik bahwa Avelino dan Rotmans mencoba mengarahkan kondisi tujuan ke arah yang lebih kolektif (*common interest*) tidak secara individual dalam sebuah sistem sosial walaupun mobilisasi juga dapat digunakan untuk kepentingan individu (*self-interest*). Perbedaan antara ‘*common interest*’ dan ‘*self-interest*’ terletak pada tingkatan analisis bahkan pandangan politisnya tetapi tidak mengeneralisir dengan definisi kekuasaan yang umum karena sejatinya kekuasaan adalah produk dari sebuah medium sosial dan produk evolusioner yang diwujudkan dalam kemampuan aktor-aktor dalam memobilisasi sumber daya. Hal tersebut senada dengan Morriss dalam Avelino and Rotmans (2009) yang menyatakan segala sesuatu tentang kekuasaan

dapat dikatakan sebagai ide dari kapasitas untuk memengaruhi sebuah keluaran (*impact outcomes*).

Diskusi berkenaan dengan kuasa dan bagaimana kekuasaan digunakan tidak lepas dari hubungan keduanya, namun lebih kepada relasi antara individu dan masyarakat lebih dari sekadar asumsi yang menyatakan individu tidak berdaya dibandingkan institusi, grup, dan negara. Berdasarkan pola kunci kekuasaan di atas tentu menyatakan kekuasaan tidak terkonsentrasi pada suatu entitas saja, melainkan tersebar diseluruh komponen masyarakat, berkembang, dan beragam bentuknya untuk memobilisasi sumber daya tertentu dengan tujuan tertentu pula (Bălan, 2009).

Tentu analisis tersebut memberi peta jalan bagi peneliti dalam melihat kekuasaan dan resistensi lebih jauh lagi sebagai relasi tanpa sekat, berubah cepat, serta tidak stabil dimana selalu diperbarui dan diafirmasi kembali termasuk dalam relasi gender yang timbul akibat krisis iklim. Relasi kuasa tersebut dijelaskan oleh Avelino and Rotmans (2009) menggunakan basis dua dimensi yang berbeda dimana kekuasaan dijalankan. Pertama, sifat mobilisasi yaitu 'inovatif' adalah kapasitas aktor-aktor untuk menciptakan dan menemukan sumber daya baru dimana cenderung konstruktif dan destruktif adalah kemampuan untuk merusak sumber daya yang sudah ada dengan sifat dekonstruktif. Kedua, tingkatan mobilisasi yaitu sumber daya dan distribusi sumber daya yaitu konstitutif (bersifat konstruktif) adalah kemampuan untuk menkonstitusikan sebuah distribusi sumber daya, hal ini berarti untuk menyediakan, mengorganisir, dan bertindak agar terstruktur dan stabil hal ini tidak terbatas dan terjebak dalam definisi institusi secara harfiah, melainkan terorganisir dan dijalankan oleh aktor-aktor. Lalu transformatif (bersifat

dekonstruktif) adalah kemampuan untuk mentransformasikan distribusi sumber daya, baik dengan cara mendistribusikan dan/atau mengantikkannya sumber daya yang baru dengan yang lama.

Oleh karena itu sifat dari kekuasaan dilihat dari kedua dimensi menjadi kekuasaan konstruktif dan dekonstruktif, hal tersebut lah yang menjadi acuan adanya tipe relasi kuasa yang sebagai hasil analisis oleh Avelino and Rotmans (2009) menyebutkan relasi kuasa adalah sesuatu tentang tingkat ragam ketergantungan atau '*dependency*' yang menciptakan konsekuensi antara 'keseimbangan' (*balance*) dan 'ketimpangan' (*imbalance*) pada satu ruang kekuasaan. Untuk lebih memahami konteks telah tersedia pada gambar 1.4. Dimana dipisahkan oleh tiga tipe yaitu: mempunyai kekuasaan 'berlebih', mempunyai kekuasaan 'lebih' atau 'kurang', dan mempunyai kekuasaan 'berbeda'.

<i>Type of power relation</i>	<i>Balance</i>	<i>Imbalance</i>
Having power 'over'	A depends on B but B also depends on A, so A and B have power over each other = mutual dependency	A depends on B but B does not depend on A, so B has power over A = one-sided dependency
Having 'more' or 'less' power	A mobilizes more resources than B, but A and B have goals that are collective or co-exist = co-existence/ cooperation	A mobilizes more resources than B, while A and B have mutually exclusive goals = competition
Having a 'different' power	A exercise power in such a way that it enables and enforces the power exercised by B = synergy	A exercises power in such a way that it disrupts or prevents power exercised by B = antagonism

**Gambar 1.4 Tipe Relasi Kuasa oleh Flor Avelino and Jan Rotmans (2009)**

Tentunya ketiga hal tersebut mempunyai konsekuensi dan relasi kuasa yang kontekstual satu sama lain memengaruhi keseimbangan dan ketimpangan kekuasaan berdasarkan tingkat keefektivitasan penggunaan kekuasaannya termasuk

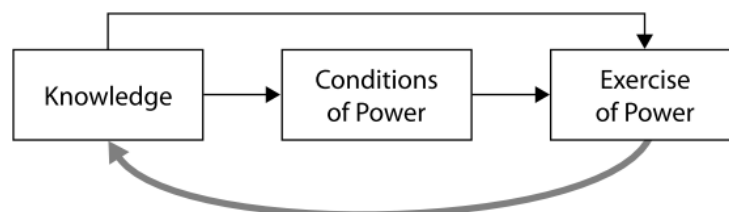
bagaimana pengguna kekuasaan memberikan posisi tawar yang paling maksimal atas suatu keadaan. Pertama, kondisi penggunaan relasi kuasa yang berlebih akan timbul keseimbangan jika bersifat mutualistik antara A dan B saling bergantung. Sedangkan jika hanya satu sisi saja akan terjadi ketimpangan, yaitu kekuasaan atas B harus bergantung pada sumber daya yang hanya bisa di mobilisasi oleh A. Bahkan jika A mempunyai kekuasaan berlebih jika hanya A yang bisa memobilisasi maka, A masih memiliki porsi kekuasaan lebih atas B dan bergantung hanya pada mobilisasi sumber daya oleh A. Kedua, jika keadaan relasi kuasa A yang digunakan 'lebih' atas B akan menghasilkan konflik atau kompetisi tergantung dengan tingkat eksklusivitasnya (*imbalance*). Tetapi jika A dan B memobilisasi sumber daya untuk tujuan kolektif atau tujuan yang independent satu sama lain maka akan tercipta kooperasi dan *co-existence* daripada kompetisi (*balance*). Ketiga, berjalannya tipe kekuasaan yang berbeda, yaitu keadaan dimana A menggunakan kekuasaanya untuk mempermudah dan memberdayakan kekuatan milik B maka akan tercipta sinergi (*balance*) sebagai contoh yaitu kegiatan pemberdayaan (*empowerment*). Sebaliknya jika keadaan B menggunakan kekuasaanya untuk mengganggu dan mencegah penggunaan kuasa atas B dengan kata lain bersifat antagonisme maka akan terjadi *imbalance*.

Menilik diskusi diatas maka relasi kuasa berbasis gender memiliki berbagai posisi yang menguatkan *thesis* penelitian, yaitu merujuk pada relasi kuasa yang terjadi dan bagaimana relasi kuasa berjalan akibat fenomena krisis iklim. Pada pembahasan krisis iklim dalam analisis gender tentu sudah menunjukkan bahwa keberadaan fenomena ini tidaklah berdiri secara netral melainkan timpang.

Kerugian atas distribusi sumber daya yang tidak setara dalam konteks ini memberikan dampak yang cukup signifikan dari berbagai sektor yang ditinjau seperti kemiskinan dan hak-hak politik dimana keluarannya tentu akan memengaruhi kesejahteraan perempuan. Berjalannya relasi kuasa dikaitkan dengan ketiga jenis relasi kuasa diatas menjadi sangat relevan realitanya. Perempuan sering kali dalam keadaan krisis iklim bergulat pada kebuntuan terhadap berbagai pilihan akibat terbatasnya akses dan sumberdaya yang mereka miliki. Sebagai contoh, ketika perempuan berada pada satu norma dan struktur sosial secara mikro tidak memperbolehkan mereka untuk bekerja selain mengurus rumah tangga, maka mereka tidak lagi mempunyai posisi tawar yang kuat terlebih jika kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya kekuatan aturan dan afirmasi dari negara atau institusi yang ada. Hal ini terjadi karen perempuan tidak memiliki alokasi cukup untuk memobilisasi sumber daya atas posisi yang telah diberikan. Hal yang sama terjadi pada fenomena krisis iklim, ketika perempuan tidak memiliki posisi tawar (kemampuan memobilisasi) atas suatu sumber daya seperti pengetahuan, fisik, dan mental, serta hak-hak politik (pendapat dan keyakinan politik) maka pada saat yang tepat mereka tidak memilki pilihan lain selain mendengarkan dan bergantung pada suami/laki-laki ketika kekeringan melanda atau gagal panen menjadi wabah bagi pertanian mereka. Sebagai pilihan sosial ekonomi, maka tentu perempuan petani pada khususnya tidak semudah suami atau laki-laki petani untuk mengganti model pekerjaan yang cocok selain bertani. Kondisi ini bahkan menjadi lebih buruk ketika ranah domestik dimasukan kedalam interseksi sosial-ekonomi, maka ‘beban ganda’ yang ditanggung khususnya oleh perempuan petani melengkapi ketidakseimbangan

relasi kuasa yang merugikan bagi perempuan dalam memperoleh kesejahteraan baik secara ekonomi (pendapatan), waktu, tenaga, dan hak-hak politik lainnya.

Sebagai tambahan contoh penjelasan atas penggunaan kekuasaan dapat dilihat dari relasi pengetahuan dengan kekuasaan —pengetahuan menjadi ujung tombak atas penggunaan kekuasaan (gambar.1.5). Hal tersebut didasarkan dengan bagaimana seseorang mendapatkan akses sumber daya, operasionalisasi strategi untuk memobilisasi kekuasaan, bagaimana untuk mengaplikasikannya kedalam metode-metode tertentu, dan niatan (*willingness*) untuk menggunakan kekuasaan dalam mencapai tujuan tertentu (Avelino and Rotmans, 2009). Sebuah titik buta yang terjadi pada ketimpangan gender yaitu ketika perempuan khususnya



*Gambar 1. 5. Kondisi Relasi Pengetahuan dan Kuasa oleh Flor Avelino and Jan Rotmans (2009)*

perempuan petani cenderung tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam membangun atau menggunakan relasi politiknya baik dalam tingkatan mikro maupun makro. Pada konteks krisis iklim, diskusi diatas cukup menggambarkan bagaimana perempuan khususnya perempuan petani dirugikan atas relasi kuasa yang berjalan dengan meningkatkan keluaran yaitu kerentanan atas diri perempuan dan kesejahteraan yang didapatkannya sebelum, saat, dan sesudah terjadinya fenomena krisis iklim dalam berbagai bentuk dan situasi kontekstual serta interseksi lainnya. Pada pembahasan selanjutnya akan memperdalam mengenai bagaimana kerentanan tersebut tercipta, dalam bentuk apa, dan signifikansinya.



### ***1.5.3 Kerentanan Perempuan Terhadap Krisis Iklim***

Kerentanan dapat terjadi akibat ketidakmampuan perempuan dalam menjalankan peran politiknya sebagai sebuah individu untuk mendapatkan berbagai akses untuk menjadi sejahtera dan aman dalam berbagai kondisi termasuk krisis iklim. Sehingga dalam mengkonseptualisasi kerentanan perempuan dalam krisis iklim, merujuk pada kondisi dimana arti ‘kerentanan’ sudah bergeser dari arti kapasitas seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi ‘korban’ secara biofisik ke potensi yang mampu merugikan secara sosial—yang selanjutnya disebut dengan kerentanan sosial. Mengapa demikian? Perhitungan kerentanan sosial dalam bencana khususnya krisis iklim dapat menjadi sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan setiap individu atau kelompok menerima dampak yang berbeda sesuai dengan kondisi internal dan konstruksi sosial yang (Arora-Jonsson, 2011; Goodrich et al., 2019; Terry, 2009a, 2009b). Begitu pula kerentanan sosial berbasis gender yang terjadi perempuan dalam krisis iklim, laki-laki dan perempuan menghadapinya secara berbeda seperti yang telah disebutkan pembahasan sebelumnya.

Mengetahui keadaan diatas maka poin yang perlu disadari bersama diluar persoalan biofisik adalah perempuan dalam krisis iklim tidak mengalami kerentanan hanya sebagai seorang perempuan, karena kerentanan adalah persoalan gender dimana diferensiasi gender itu sendiri berangkat dari norma sosial dan budaya yang dilegitimasi pada *scope* wilayah dan tempo waktu tertentu, sehingga kerentanan sejatinya bisa dirubah dan tidak konstan (Arora-Jonsson, 2011; Goodrich et al., 2019). Sumber lain memperbaharui basis definisi berkenaan dengan

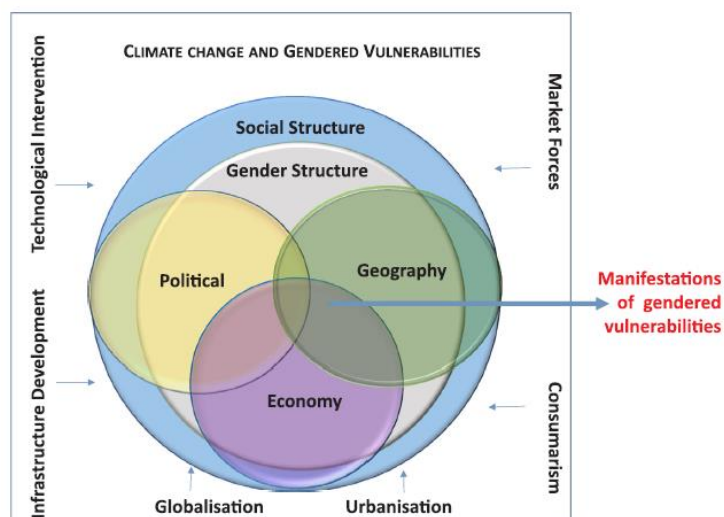
hal tersebut yaitu pada *Fourth Assessment Report* oleh IPCC (2007) yang menekan pada kesadaran bahwa relasi dan peran gender membentuk kerentanan<sup>7</sup> dan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dengan krisis iklim. Perempuan dan laki-laki memiliki kerentanan yang berbeda-beda dalam berhadapan dengan efek dan resiko krisis iklim, pandangan, informasi, dan cara berpikir yang terstruktur baik secara alamiah maupun sosial juga berbeda, sama halnya dengan berbagai bencana yang melanda akibat krisis iklim akan dirasa berbeda nilainya bagi masing-masing laki-laki dan perempuan (Terry, 2009b, 2009a). Bagaimanapun, kerentanan tidak hanya dialami, tapi lebih telah menubuh dalam keadaan personal masing-masing individu utamanya pada perempuan (Liverman, 2015). Maka dari itu, bentuk kerentanan yang terjadi pada perempuan dalam krisis iklim tentu tidak bisa digeneralisir dan cenderung akan terjadi *miss leading* dalam menafsirkan implikasi dan dampak dalam beberapa kelompok masyarakat.

Mengingat hal tersebut, gambaran yang diberikan oleh Goodrich (2019) dalam penelitiannya di Pegunungan Himalaya menjelaskan bahwa kerentanan perempuan dalam krisis iklim dimanifestasikan kebeberapa irisan faktor salah satunya kondisi geografi dan ekonomi. Walaupun tidak bisa ditarik kesimpulan pada setiap daerah, tapi setidaknya ia berhasil menggambarkan irisan terkait kerentanan perempuan dalam berbagai praktik diwujudkan dalam bentuk rendahnya penghasilan, rendahnya akses kesehatan dan akses fasilitasnya, malnutrisi, pendidikan yang rendah, *skills* yang rendah, kebergantungan yang tinggi terhadap

---

<sup>7</sup> **Vulnerability/Kerentanan:** kecenderungan kuat secara alamiah untuk mendapatkan dampak yang buruk. Kerentanan menekankan pada varietas konsep dan elemen termasuk sensitivitas untuk terluka dan terjebak dalam kapasitas untuk adaptasi dan bertahan (Pink, 2018)

hasil alam, terbatasnya kapasitas usaha, jumlah risiko bencana, dan kerentanan fisik (lihat Gambar. 1.6)



*Gambar 1.6 Pola kerentanan gender dan perubahan iklim (Goodrich, 2019)*

Dari penjelasan diatas maka pola kerentanan yang didapatkan dari interseksi antar berbagai faktor agar tidak terjadi miskonsepsi juga didukung dengan analisis pergerakan sosial-ekonomi yang berlangsung menyebabkan kerentanan gender semakin jelas untuk dipahami, kedua *intersectional* dan pergerakan sosial-ekonomi menjadi kombinasi yang sesuai dalam melihat manifestasi kerentanan gender —selanjutnya akan dijabarkan pada sub pembahasan berikutnya (Liverman, 2015; Goodrich, 2019).

Dari penjabaran Goodrich, peneliti mampu memberikan interseksi yang menjadi landasan bagi penelitian lapangan yaitu dengan melihat tiga hal utama yaitu geografis, sosial-ekonomi, dan sosial-politik. Ketiga hal tersebut menimbulkan konsekuensi ilmiah yang tepat mengambil rasionalisasi adanya kerentanan gender akibat krisis iklim. Aspek geografis dalam konteks ini memberikan penekanan terhadap bagaimana kondisi alam mampu memberikan

kerentanan yang signifikan, berkaitan dengan proses adaptasi dan pembentukan perubahan sosial-ekonomi dan sosial politik. Ketika terjadi kekeringan dan curah hujan yang minim maka kecenderungan adaptasi dan penggunaan berbagai sumber daya politik dapat terlihat. Perempuan memiliki kecenderungan dan tipe yang berbeda sesuai dengan kondisi empiris yang dilalui oleh masing-masing kelompok masyarakat (Avelino & Rotmans, 2009; Goodrich et al., 2019).

Irisan lain pada gambar yang dibubuhkan diatas, adalah keberadaan kondisi sosial-politik dan sosial-ekonomi masyarakat tersebut. Tentu kedua keadaan tersebut sangat berkaitan sebagai dua interseksi. Secara ekonomi perbedaan kondisi ini secara sederhana dapat digambarkan dengan situasi perempuan petani memiliki keragaman tingkat pendidikan, pengetahuan, dan posisi tinggi secara sosial di masyarakat akan mengalami tingkat kerentanan yang berbeda pula. Termasuk pada spesifikasi pekerjaan, perempuan petani buruh akan berbeda dengan pemilik ladang karena perbedaan interseksi atau kondisi sosial-politiknya. Begitupula pada tingkat kerentanannya, perempuan petani buruh akan mengalami dampak krisis iklim yang lebih merugi pada aspek ekonomi dan tenaga yaitu beban ganda daripada pemilik tanah yang akan merugi secara ekonomi saja. Tidak tersedianya peraturan secara lokal yang mengatur adanya adaptasi krisis iklim bagi perempuan secara setara juga menjadi faktor politis yang merugikan perempuan petani, hal ini berbeda dengan wilayah yang telah memilikinya, tingkat kerentanannya akan jauh lebih minim walaupun hal tersebut bukan jaminan adanya keluaran kesejahteraan yang setara.

Selain itu beberapa bukti yang dihimpun peneliti, terdapat beberapa bentuk kerentanan yang timbul akibat irisan sosial-ekonomi dan sosial-politik dapat

merugikan perempuan dalam krisis iklim dimana kerangka contohnya diadaptasi dari Wamukonya dan Skutsch dalam Dankelman (2002). Pertama, Spesifikasi gender dalam pola penggunaan sumber daya dapat mendegradasi lingkungan. Salah satu indikator dalam melihat diferensiasi atau spesifikasi gender adalah dengan melihat adanya dominasi laki-laki pada tingkatan makro yaitu dalam organisasi masyarakat yang menentukan pembuatan keputusan terhadap kebijakan-kebijakan beserta programnya, khususnya yang berhubungan dalam kegiatan kelingkungan dan krisis iklim; terbatasnya posisi perempuan dalam mendapatkan akses aset dan sumberdaya pada lahan pertanian; norma gender dan struktur dan/atau konstruksi sosial yang berlaku membelenggu ruang gerak perempuan dalam memutuskan sebuah keputusan diatas laki-laki dalam rumah tangga. Diluar rumah dalam posisi makro, diskriminasi norma dan status sosial ekonomi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan meningkatkan ketidakmampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar pekerja secara formal, bergabung dalam organisasi sipil, atau politik lainnya (hal ini sering terjadi di masyarakat pertanian di negara berkembang dan pada kelas ekonomi bawah) (Eastin, 2018).

Sebagai contoh, di India kesempatan untuk perempuan memegang peran dalam pengambil keputusan bukanlah hal yang mudah, kasta yang masih berlaku seringkali mengesampingkan keunggulan perempuan dalam menangani permasalahan krisis iklim atau lingkungan lainnya (Arora-Jonsson, 2011). Senada dengan hal tersebut, Eastin (2018) menemukan perempuan pada wilayah yang relatif kurang demokratis, bergantung pada agrikultur/pertanian, dan berada pada tingkatan bawah pada pembangunan ekonomi yang disebabkan oleh

ketidakseimbangan pemasukan dan aset antara perempuan dan laki-laki dalam satu keluarga. Pada fenomena kekeringan misalnya, bentuk kerentanan nyata adalah saat laki-laki harus mencari pekerjaan selain bertani, dimana akses terhadap sumberdaya dan aset untuk perempuan terbatas ditambah dengan norma gender yang mengatur perempuan menimbulkan konsekuensi kerentanan perempuan dalam memenuhi independensi ekonomi dan kapasitas sosial mereka dari laki-laki. Tentu jangka panjangnya akan berdampak pada posisi tawar atau *bargaining power* yang rendah dalam rumah tangga, didukung dengan tidak mampunya perempuan untuk mendapatkan pendapatannya sendiri. Seperti di negara-negara Afrika saat terjadi bencana perempuan tidak bisa meninggalkan rumah bahkan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri karena harus menunggu izin dari suami walaupun disaat genting sekalipun (Arora-Jonsson, 2011).

Kedua, dampak diferensiasi gender dalam krisis iklim menjadi sangat serius pada tingkatan mikro didasarkan pada status perempuan yang berbeda membuat mengalami pengalaman yang berbeda dengan laki-laki, dan tidak jarang lebih rentan. Melalui analisis interseksional, permasalahan yang berrelasi kuasa dengan dimensi gender dan lingkungannya, seperti iklim (banjir dan kekeringan) akan menimbulkan dampak negatif bagi pekerjaan sehari-hari perempuan yang menambahkan beban-beban bagi mereka (Dankelman, 2002; Kaijser dan Kronsell, 2014).

Pada ilustrasi gambar 1.5, dapat dilihat bahwa dimensi gender berkaitan kemampuan ekonomi, tidak adanya ruang penambahan kapasitas semakin memperburuk keadaan. Hal yang sederhana dan sering ditemukan adalah dalam

memasuki ranah pembagian kerja dan konstruksi pekerjaan *productive* dan *reproductive* dimana peran gender terpengaruhi oleh tiga faktor utama, rasional atau ekonomi yang berperan dalam menentukan kerentanan perempuan terhadap sebuah situasi ketimpangan kekuasaan termasuk dampak krisis iklim. Dimulai dari beban keuntungan komparatif gender tertentu berkapasitas lebih dalam melakukan suatu pekerjaan (domestik dan publik); sosial-kultural —dimana peran gender dalam tataran mikro (rumah tangga) dipengaruhi oleh proses sosial di atasnya (relasi sosial); dan alasan biologi atau fisik —dimana meletakkan keharusan bahwa kekuatan fisik laki-laki membuat mereka lebih unggul di atas perempuan (MacGregor, 2010).

Aspek *stereotype* terhadap biofisik tersebut berimplikasi pada ketidakadilan mitigasi dan adaptasi yang bias terhadap gender. Beberapa studi kebencanaan menemukan terdapat dimensi gender dalam mitigasi bencana dan manajemen lingkungan, perempuan sering kali dipotretkan berbeda dibandingkan dengan laki-laki —subordinasi atas peran perempuan menjadi salah satu faktor kerentanan ini, termasuk dalam mendapatkan informasi dan akses kapasitas teknologi krisis iklim.

Sebagai contoh, di China walaupun tidak ada perbedaan pengetahuan yang signifikan terhadap krisis iklim tapi laki-laki dalam rumah tangga (suami/kepala rumah tangga) lebih mampu dalam beradaptasi dengan krisis iklim melalui kapasitas teknologi untuk ketersediaan air dan meningkatkan investasi untuk irigasi dibanding dengan perempuan yang dalam konteks ini bukanlah pemegang hak aset pertanian sehingga cenderung ter subordinasi, bahkan cenderung tidak dianggap perlu untuk mengadopsi teknologi tersebut (Jin, Wang, & Gao, 2015). Terakhir,

gender dan pembuatan kebijakan dalam krisis iklim, tidak luput dari indikasi kerentanan perempuan terhadap krisis iklim. Seperti yang terlihat perempuan memegang peran terbatas sebagai pembuat kebijakan krisis setidaknya inilah yang membuat absennya perspektif gender dan cenderung merugikan perempuan.

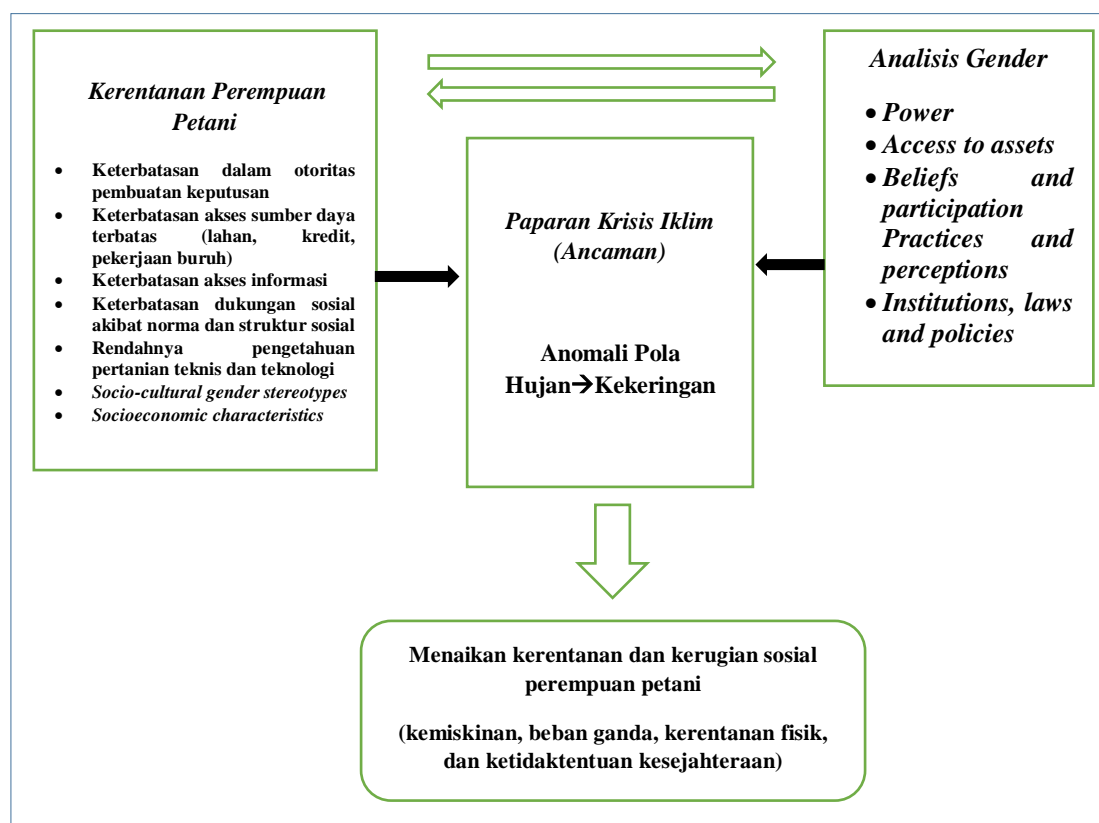
Kapasitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi momok karena kurangnya akses pendidikan, pelatihan, dan teknologi terhadap perempuan yang pada pembahasan sebelumnya telah disinggung. Pembuatan program mitigasi krisis iklim yang sensitif gender adalah sebuah kebutuhan. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasannya sebelumnya, ketidakberuntungan posisi perempuan dalam masyarakat untuk menghadapi krisis iklim yang dikaitkan dengan *power* dan *intersection relation* menjadi indikator kerentanan bagi perempuan dalam menghadapi krisis iklim, karena tidak berada pada posisi, kesempatan, dan kemampuan yang setara akibat dominasi dan/atau hegemoni dalam struktur sosial masyarakat tertentu (Macgregor, 2010). Dampak dari area ini tentu mengarah langsung kepada tantangan untuk bagaimana hukum dan norma yang tadinya membentuk gender sebagai kerentanan untuk lebih *equaly* atau setara.

#### **1.5.4 Perempuan Petani dan Kerentanannya Akibat Krisis Iklim**

Penyelidikan terhadap krisis iklim pada penelitian ini bertujuan menggali lebih dalam dampak yang dirasakan bagi perempuan petani. Seperti yang telah didiskusikan pada sub bahasan diatas. Teori-teori memperkuat bukti krisis iklim berdampak besar bagi dunia pertanian. Relasi gender yang menubuh dalam norma-norma dan struktur sosial masyarakat tidak dipungkiri menjadi kerentanan utama yang dapat menimbulkan berbagai kerugian sosial berbasis gender bersama elemen



interseksi lainnya seperti sosial-ekonomi, sosial-politik, dan geografis (Eastin, 2018; Goodrich et al., 2019; MacGregor, 2010). Setidaknya ada berapa sorotan yang memproyeksikan kerentanan perempuan petani akibat perempuan petani yang telah dipaparkan pada gambar 1.7. Kendala utama adaptasi krisis iklim perempuan petani adalah banyaknya tekanan kerentanan-kerentanan di dalam masyarakat mereka sendiri yang menimbulkan kurangnya ketangguhan perempuan petani dalam menghadapi krisis iklim yang didiskusikan pada pembahasan berikut (Arora-Jonsson, 2011; Jost et al., 2016).



Gambar 1.7. Kerentanan Perempuan Petani Akibat Perubahan Iklim diadaptasi dari Paul & Harris (2011)

Pertama, lemahnya kemampuan adaptasi perempuan petani terhadap krisis iklim hadir karena adanya hubungan kuat dengan gender dan kerentanannya yang

mengakar kuat pada masyarakat petani. Bukan tanpa sebab, adaptasi perempuan petani dihadapkan pada struktur dan norma masyarakat. Sehingga, kerentanan perempuan petani utamanya menimbulkan kerugian sosial. Berupa ketimpangan akses untuk mendukung adaptasi krisis iklim perempuan petani khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia begitu tinggi dibanding dengan petani laki-laki. Terlihat jelas pada rendahnya pelibatan perempuan dalam pembuatan keputusan termasuk dalam segi menentukan pembagian kerja, fasilitas kredit lahan, dan asuransi dikarenakan sudah terlimitasi dengan peran gender di masyarakat (Perez et al., 2015; Wrigley-Asante, Owusu, Egyir, & Owiyo, 2019).

Kedua, akibat krisis iklim secara mobilitas sosial, kecenderungan adanya migrasi kaum laki-laki akan semakin besar untuk memenuhi kebutuhan hidup selain dari bertani yang mengering dilanda dampak iklim. Disinilah titik hitam yang menjadi kerugian bagi kerentanan perempuan petani. Pada penelitian sebelumnya di Vitenam, migrasi atau pengalihan pekerjaan laki-laki menjadi salah satu tekanan struktur sosial yang pada akhirnya meninggalkan kaum orang tua dan perempuan dalam mengurus sisa pertanian yang ada. Walaupun demikian, tidak ada jaminan kesejahteraan bagi perempuan dimana kapasitas, kontrol akan sumber daya dan akses legal serta pengetahuan untuk menanam dan memulihkan keadaan akibat iklim tidak lebih dari petani laki-laki. Tidak lain karena pembagian kerja selama ini hanya berfokus kepada gender saja, termasuk didalamnya kepercayaan sosial dan cara institusi, hukum, dan kebijakan memperlakukan perempuan petani tidak sebagai peran sentral dalam pertanian. Sehingga meninggalkan perempuan petani dalam ketertinggalan (Paul & Harris, 2011; Ylipaa, Gabrielsson, & Jerneck, 2019).

Ketiga, berhubungan dengan penjelasan kedua, ketertinggalan perempuan petani dalam berbagai hal termasuk hal se-vital adaptasi krisis iklim menimbulkan kerugian material dan imaterial. Subordinasi yang muncul dari segi pekerjaan sebagai petani perempuan dimana ruang kemandirian ekonomi dan penghargaan atas pekerjaan sangat terbatas, ditambah dengan berperannya perempuan petani sebagai ibu yang mengurus pekerjaan domestik, menghasilkan ‘beban ganda’ bagi mereka (Mamaril & Lu, 2019; Terry, 2009a).

### **1.6 Definisi Konsep**

Setelah mengetahui teori yang akan digunakan untuk mempertajam analisis data, peneliti kemudian akan mengelaborasi terkait operasionalisasi konsep. Dalam penelitian ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan sebagai fokus, yaitu: Proses krisis iklim dalam analisis gender dan keterkaitan relasi gender dan kerentanan perempuan petani dalam krisis iklim.

#### **1. Krisis Iklim**

Krisis iklim adalah sebuah variasi perubahan yang mempunyai signifikansi terhadap keadaan rerata iklim dan variabilitasnya di iklim suatu lokasi, wilayah, dan planet secara spesifik dalam waktu yang lama. Krisis iklim sangat memengaruhi rerata cuaca, seperti fluktuativnya temperatur, pola angin, dan hujan yang menimbulkan ketidakpastian iklim global dan lebih lanjut memengaruhi dan menjadi tantangan untuk segala yang terdampak olehnya. Krisis iklim disebabkan oleh berlangsungnya proses alam atau faktor eksternal dan aktivitas manusia yang berubah dalam menyumbang perubahan komposisi atmosfer dan alih fungsi lahan

(*anthropogenic*). Karena krisis tersebut, implikasinya akan menimbulkan berbagai gejala-gejala luar biasa yang bervariasi diseluruh belahan dunia.

Aktivitas manusia dinilai menjadi penyumbang dominan terhadap percepatan krisis iklim secara global yang berlangsung sejak revolusi industri pertama dan meluasnya kapitalisme global destruktif berupa: menimbulkan efek polusi; deforestasi dan pembalakan hutan; sumbangan terhadap konsentrasi emisi gas-gas rumah kaca dan aerosol sulfat melalui jejak karbon hasil pemakaian bahan bakar fosil; konsumerisme kompleks dengan eksploitasi berlebih terhadap sumber daya Bumi; *overproduction* pada kegiatan agrikultur dan *livestocks* skala besar.

Dengan demikian, eratnya hubungan bumi dan aktivitas manusia dinilai sebagai pembentuk realitas krisis iklim dalam arti buruk —tanpa pemahaman ideologis yang benar terhadap pengelolaan Bumi itu sendiri dan kontrol atas kuasa negara dan subjek yang berkuasa sehingga diskusi mengenai dampak krisis iklim sesungguhnya sedang berdiskusi tentang bagaimana krisis iklim terjadi sebagai dampak dari adanya relasi kuasa yang timpang —mempunyai hubungan sebab akibat dimana merugikan dapat merugikan suatu kelompok.

### **Krisis Iklim Sebagai Isu Global**

Dunia sudah mulai lama menyadari akan hal ini dengan dibentuknya *Intergovernmental Panel on Climate Change* pada tahun 1988 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk menyajikan data saintifik dalam segala tingkatan sebagai acuan pembuatan

kebijakan tentang kebijakan iklim, dimana sampai sekarang sudah mencapai pelaporannya yang kelima (*assessment report*) krisis iklim. Dan berakhir pada kesepakatan untuk yang mempertahankan suhu global pada 2 °C dan/atau dapat mencapai batasan di bawah 1.5 °C, dengan cara membangun adaptasi dan ketangguhan serta pembangunan berbasis iklim yang rendah emisi pada perjanjian terbaru yaitu *The Paris Agreement* pada 2015, dimana berbagai pemerintahan di seluruh dunia meratifikasinya.

Sebagai urensi global, penggunaan terminologi krisis iklim kini telah bergeser menjadi '*krisis iklim*' untuk menekankan keadaan iklim global yang sedang krisis dibandingkan term '*perubahan iklim*' yang dirasa terlalu lembut dan kurang didengar luas sebagai ancaman yang memusnahkan.

## 2. **Krisis Iklim dalam Perspektif Gender**

Berbicara tentang aspek dan analisis gender serta kesetaraanya tidak akan lepas dengan pendekatan atau paradigma feminisme dan interseksionalitas. Lantas, ruh dari logika krisis iklim dalam perspektif gender adalah eksistensi penanganan, adaptasi, dan kegiatan serta aktivitas manusia dalam konteks krisis iklim tidak benar-benar berdiri pada posisi netral terhadap gender.

Dalam analisis gender, perempuan berada pada kondisi yang tidak menguntungkan akibat ketidaksetaraan distribusi kesejahteraan dan kekuasaan sebagai penyebab utama, berdampak pada cara menghadapi krisis iklim secara langsung dengan lingkungan sekitarnya sekaligus

secara tidak proporsional terdampak oleh adanya degradasi lingkungan. Secara sosial, perspektif gender menjelaskan konteks fenomena politik yaitu relasi kuasa dan konstruksi hegemoni dari maskulinitas dan feminisme yang secara spesifik berbasis gender. Analisis gender dalam krisis iklim secara akurat dilihat dari relasi gender dalam interseksionalnya (*intersectional analysis*), *social role and responsibility*, dengan lingkungannya dalam konteks kekuasaan.

Pengalaman ini memberikan posisi bagi perempuan yang dinilai masih banyak tertinggal dan belum dapat beradaptasi, ter subordinasi dan termarginalisasi atau dijadikan sasaran kejahatan dalam kejadian bencana akibat krisis iklim. Implikasi pada konsep *double burden* dimana pada umumnya perempuan memunyai pekerjaan ‘domestik’ sedangkan laki-laki mengurus pekerjaan ‘eksternal’ (seringkali kegiatan ekonomi) tetapi harus dibebankan dengan urusan eksternal juga akibat dampak krisis iklim mengganggu siklus pertanian yang berimplikasi pada perekonomian keluarga petani. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang berasal dari ketidaksetaraan gender dan ketidakkuasaan perempuan atas laki-laki karena diferensiasi dan variabilitas sosial yang terjadi baik yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan.

### 3. **Krisis Iklim dan Gender dalam Lensa Kuasa dan Relasinya**

Kekuasaan adalah sebuah strategi yang dapat dimiliki oleh siapa saja sebagai subjek pengguna kekuasaan, beserta relasi-realsi yang saling berubah-ubah dalam seluruh komponen masyarakat termasuk hubungan

keluarga, di dalam institusi, dan administrasi dengan cara menggunakan Kemampuannya untuk memobilisasi suatu sumber daya dalam mencapai tujuan tertentu pula. Kekuasaan menjadi sesuatu yang ‘elastis’ yaitu tidak terpaku pada kesatuan dominasi yang mutlak pada kelompok masyarakat tertentu. Sehingga *power* berjalan melalui konsekuensi *behaviour* atas kekuasaan yang terus berkembang —termasuk dalam ranah mikro maupun makro pada konteks. Relasi kuasa berbicara mengenai konsep ketergantungan sebagai dampak dari kemampuan untuk memengaruhi satu sama lain yang menimbulkan konsekuensi ‘*power of balance*’ dan/atau ‘*power of imbalance*’. Pada analisis gender pola relasi kuasa yang hadir cenderung memosisikan pada titik ketidakseimbangan akibat berbagai interseksi yang ada. Hal tersebut menimbulkan kerugian dan ketimpangan distribusi kesejahteraan.

Namun, diriskus kekuasaan berbicara dengan bagaimana proses penggunaan kuasa secara politis baik ditingkat mikro maupun makro dapat didistribusikan dan digunakan secara konstruktif dan transformatif untuk kesejahteraan yang setara (seimbang) khususnya dalam konteks adaptasi fenomena krisis iklim —agar tidak menimbulkan kerentanan yang menjulang bagi suatu kelompok khususnya perempuan petani.

#### 4. **Krisis Iklim dan Kerentanan Perempuan**

Krisis iklim dan dampak kerentannya tidak hanya merefleksikan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang telah ada, melainkan munculnya fenomena krisis iklim memperkuat dan

memperburuk adanya kerentanan berbasis gender yang dilihat dari tiga interkseksi utama yaitu geografis, sosial-ekonomi, sosial-politik. Tidak hanya disebabkan karena adanya akses terbatas bagi perempuan dibandingkan akses yang didapatkan laki-laki seperti kepemilikan lahan, kredit, dan informasi serta peran sosialnya.

Namun, indikasi kerentanan perempuan dalam krisis iklim sangat terlihat jika dilihat dari spesifikasi gender yang mengakibatkan subordinasi perempuan dalam melakukan adaptasi terhadap krisis iklim pada tingkat mikro dan makro. Keterbatasan akses yang dialami oleh perempuan mengakibatkan perbedaan pengalaman dalam menangani bencana dengan laki-laki, dan tidak jarang lebih membuat perempuan lebih rentan. Terlebih didukung dengan aspek kebijakan mitigasi dan adaptasi krisis iklim yang bias gender.

Perempuan memiliki peran yang terbatas sebagai pembuat kebijakan krisis setidaknya inilah yang membuat absennya perspektif gender dan cenderung merugikan perempuan. Selanjutnya, kapasitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi momok karena kurangnya akses pendidikan, pelatihan, dan teknologi terhadap perempuan. Dalam memasuki ranah pembagian kerja dan konstruksi pekerjaan *productive* dan *reproductive* dimana peran gender terpengaruhi oleh tiga faktor utama, rasional atau ekonomi yang berperan dalam menentukan kerentanan perempuan terhadap sebuah situasi ketimpangan kekuasaan termasuk dampak krisis iklim. Dimulai dari beban keuntungan



komparatif gender tertentu berkapasitas lebih dalam melakukan suatu pekerjaan (domestik dan publik); sosial-kultural —dimana peran gender dalam tataran mikro (rumah tangga) dipengaruhi oleh proses sosial di atasnya (relasi sosial); dan alasan biologi atau fisik —dimana meletakkan keharusan bahwa kekuatan fisik laki-laki membuat mereka lebih unggul di atas perempuan. Sehingga, hal di atas mengakibatkan perempuan terus tersubordinasi, tanpa apresiasi (dianggap lumrah dalam membantu ekonomi keluarga dengan beban ganda), dan tidak mampu memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri dalam menghadapi dampak krisis iklim

#### 5. **Kerentanan Perempuan Petani dalam Krisis Iklim**

Krisis iklim bukan hanya berbicara mengenai fenomena pemanasan global (*global heating*) saja, namun efek global yang diakibatkan oleh perubahan atmosferik menjadi urgensi, terutama bagi produksi dan ketahanan pangan di dunia pertanian. Kerentanan yang hadir merupakan bentuk dari tekanan-tekanan sosial yang dibenturkan dengan ancaman krisis iklim akibat konsekuensi relasi kuasa yang terjadi berdampak terhadap berbagai macam bencana utamanya bencana secara sosial berbasis gender. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk terganggunya siklus iklim global sampai ke wilayah lokal khususnya di daerah pertanian, mengakibatkan perempuan petani yang berusaha menggantungkan hidupnya dengan hasil tani ditambah berperan sebagai ibu yang mengurus pekerjaan domestik, praktis akan mengalami ‘beban

ganda'. Dimana perempuan akan cenderung menambah alokasi jam pekerjaan mereka untuk membantu ekonomi keluarga dengan alternatif-alternatif pekerjaan lainya diluar pertanian tanpa dibayar, terjadilah *double burden* —bahkan mampu sampai *triple burden* (bertani, pekerjaan sampingan, dan pekerjaan domestik).

Dengan demikian, krisis iklim dan kontribusinya dalam dunia pertanian dan hasil alam lainnya sangat berpengaruh, konsen untuk menyelamatkan berbagai kehidupan dan penghidupan masyarakatnya, termasuk di Indonesia sangat relevan dalam menyikapi fenomena gender yang terjadi di masyarakat petani berimplikasi terhadap kehidupan perempuan petani yang semakin terdesak perekonomiannya. Sehingga menimbulkan gejala-gejala ketidakadilan atas relasi kuasa berbasis gender yang ada di wilayah mikro (keluarga) dan makro (*intersectionality* dan struktur soial) suatu masyarakat.

Sebagai tambahan fenomena krisis iklim dalam pertanian di Indonesia terjadi salah satunya diakibatkan oleh dampak terjadi anomali iklim dunia yang telah menjadi krisis dan berubah, perubahan sirkulasi atmosferik dalam beberapa tahun didominasi beragamnya pola osilasi (*pergerakan*) yaitu El Niño. Fenomena anomali ini menyebabkan udara basah di kawasan barat Pasifik seperti Peru dan California tetapi kekeringan di Indonesia, Australia, Amazon, dan sedikit bagian Afrika dimana pada waktu osiliasi tertentu. Alih-alih musim kemarau tanam di Indonesia, justru karena krisis iklim tidak terjadi demikian.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe dan Jenis penelitian**

Metodologi penelitian pada dasarnya menjelaskan bagaimana membuat argumen-argumen yang berlandaskan dengan kaidah-kaidah ilmiah melalui pengaplikasian *skills of reasoning* yang dilakukan sehari-hari kepada pertanyaan yang lebih besar dalam melihat dan mempertajam fenomena sosial-politik lalu hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. (Halperin & Heath, 2012: 2; Herdiansyah, 2010)

Dalam konteks penelitian ‘Krisis Iklim, Gender, dan Kerentanan: Potret Perempuan Petani di Karanganyar, Jawa Tengah’ metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. Melalui jenis penelitian kualitatif, bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2007:4). Oleh karena itu, peneliti hendak mendalami dan menggali makna kerentanan gender sebagai implikasi fenomena krisis iklim secara langsung terhadap di Kabupaten Karanganyar.

### **1.7.2 Desain Penelitian**

Dalam penelitian ‘Krisis Iklim, Gender, dan Kerentanan: Potret Perempuan Petani di Karanganyar, Jawa Tengah’ menggunakan pandangan teori kritis dalam mendudukan kerentanan sebagai sebuah konstruksi sosial —dimana meletakkan dampak dari krisis iklim berada pada situasi yang tidak netral gender. Disaat bersamaan peneliti terbantu penyempurnaannya dengan menggunakan paradigma *feminisme* pada khususnya konteks perempuan petani. Hal ini membantu cara analisis dan berpikir peneliti untuk menjelaskan makna yang terpancar dari

fenomena krisis iklim yang memberi dampak pada kerentanan gender bagi perempuan petani di Karanganyar, Jawa Tengah.

Kemudian peneliti akan melakukan penelitian kualitatif dengan mengambil pendekatan fenomenologi secara eksplanatori (menjelaskan apa dan bagaimana akar persoalan dari kerentanan gender akibat krisis iklim). Pendekatan fenomenologi dipilih untuk menjelaskan kehidupan individu atau kelompok individu berupa studi pengalaman mengenai bagaimana fenomena tersebut terjadi pada mereka yang menghasilkan pengertian atas keadaan mengenai fenomena yang sebenarnya (Creswell, 2007:187). Sehingga, penelitian ini juga diartikan secara mendalam untuk meneliti salah satu fenomena politik yaitu relasi kuasa atas kerentanan gender akibat krisis iklim.

Dalam mendesain penelitian ini, peneliti mencoba untuk membangun dan menggali nilai dan fakta krisis iklim oleh perempuan petani di Kabupaten Karanganyar dengan mencoba memahami secara seksama melalui tiga lapisan berdasarkan kajian fenomenologi yaitu apa sejatinya yang dilakukan oleh perempuan petani dalam menghadapi krisis iklim, menggali makna yang dirasakan dari kegiatan atau aktivitas tersebut, dan bagaimana refleksi temuan atas fenomena krisis iklim dengan tujuan untuk memotret pengalaman tersebut menjadi fakta ilmiah dalam kajian krisis iklim melalui paradigma politis.

Untuk itu penelitian ini diperkuat dengan pengambilan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara terhadap *key informant* (termasuk wawancara terhadap *stakeholders*) serta masyarakat petani (perempuan dan laki-laki petani) yang telah diseleksi secara representatif. Selain itu dilakukan pula studi

pustaka/literatur dan studi dokumen pendukung terkait dengan konteks penelitian terutama pada aspek fisik krisis iklim dan pertanian, teori gender, studi kerentanan dan kebencanaan, sosiologi, dan feminisme yang mendukung penelitian.

Dengan demikian penelitian ini memberikan pengertian mendalam mengenai fenomena krisis iklim yang memberi dampak pada kerentanan gender bagi perempuan petani di Karanganyar, Jawa Tengah.

### **1.7.3 Situs Penelitian**

Dalam penelitian ‘krisis Iklim, Gender, dan Kerentanan: Potret Perempuan Petani di Karanganyar, Jawa Tengah’ menggunakan satu situs, yaitu langsung pada lokasi masyarakat pertanian yang terdampak krisis iklim di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tepatnya berada di Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang. Pemilihan situs tersebut dilakukan berdasarkan data awal yang didapatkan peneliti mengenai signifikansi situasi pertanian di daerah tersebut yang terdampak kekeringan pada tahun 2019 dimana disana cenderung merugikan mata pencaharian petani karena menimbulkan gagal panen pada saat itu. Selain itu, pemilihan tempat didukung dengan proporsi perempuan yang cukup representatif yaitu diatas 1000 selisih jumlahnya dengan laki-laki pada satu kecamatan secara total, ditambah dengan tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi (BPS, 2018).

### **1.7.4 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini sebagai *key informant* yang diambil secara *purposive* meliputi perempuan petani, laki-laki petani, dan pemerintah kabupaten. Pemilihan subjek ini tidak lepas dari pokok permasalahan yang menimpa perempuan petani langsung dalam menghadapi krisis iklim. Terlebih dalam menggali perbandingan

adanya kerentanan gender peneliti, laki-laki petani turut menjadi responden dalam melihat signifikansi kerentanan gender akibat krisis iklim bersama pemerintah kabupaten sebagai pengambil kebijakan termasuk perannya saat terjadi fenomena krisis iklim yang berdampak bagi masyarakatnya. Wawancara penelitian juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat, media, dan akademisi lokal.

Sebagai tambahan peneliti mencoba menggali sumber data primer melalui lembaga atau institusi yang berkaitan dengan observasi lapangan terkait signifikansi adanya dampak krisis iklim di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Karanganyar. Pihak-pihak di atas diharapkan mampu menjelaskan dan menceritakan pemahaman mengenai topik penelitian dan fokus masalah yang sedang diteliti yaitu ‘Krisis Iklim, Gender, dan Kerentanan: Potret Perempuan Petani di Karanganyar, Jawa Tengah’.

### **1.7.5 Sumber Data**

Pemilihan data yang digunakan berupa kata-kata, gambaran dan/atau tindakan dimana bukan angka, jika hal tersebut ada digunakan sebagai data pendukung. Hal ini mengingat studi kualitatif yang dilakukan peneliti ditujukan untuk mengambil pengertian terhadap fenomena krisis iklim dan dampaknya bagi kerentanan gender. Oleh karena itu data-data yang digunakan berupa data sebagai berikut:

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer didapatkan melalui proses observasi dan wawancara secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian, hal ini

memungkinkan adanya interaksi antara peneliti dengan subjek penelitian. Dan akan diperoleh data berupa transkrip wawancara, catatan penelitian, dan dokumentasi langsung.

b. Sumber Data Sekunder

Berupa sumber tidak langsung yang berkaitan dengan penelitian yang diberikan oleh sumber kedua. Data ini diperoleh dengan cara studi artikel, dokumen-dokumen pendukung, arsip, jurnal berita media massa, media sosial, dan dokumentasi resmi yang mendukung penelitian di Karanganyar, Jawa Tengah.

### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi Kualitatif

Pada penelitian ini teknik observasi dilakukan dengan cara turun secara langsung ke lapangan penelitian dan mengamati secara langsung aktivitas-aktivitas perempuan petani sebagai subjek penelitian, sekaligus mengamati pergerakan subjek penelitian lainnya. Tujuan dilakukan observasi secara partisipatif dengan cara berbaur dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan keterbukaan dengan informan, mengetahui potret perempuan petani dan kerentanan gender yang dialaminya melalui proses secara natural dengan keuntungan yaitu mendapatkan kesempatan untuk menjadi tangan pertama dalam observasi dan merekam kejadian personal atau privat terkait —data observasi akan direkam melalui catatan lapangan peneliti (Halperin & Heath, 2012: 292).

b. Metode Wawancara *face-to-face*

Wawancara dilakukan sebagai metode pengumpulan data yang penting dalam penelitian ilmu politik dengan yang bertujuan untuk mendapatkan validasi pengertian dan pengetahuan ilmiah dari informan melalui penggalian pikiran-pikiran dari pertanyaan yang diajukan tanpa tujuan untuk membuat generalisasi, terlebih wawancara secara *face-to-face* mendukung peneliti untuk mengajukan pertanyaan lebih panjang dan detail dalam memperkaya serta memadatkan sumber data (Halperin & Heath, 2012: 254). Adapun subjek tujuan wawancara terbagi menjadi lima pemangku kepentingan utama yaitu pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Baperlitbang, Pertanian, serta DPRD Kabupaten Karanganyar) lembaga swadaya (Climate Reality Project Indonesia dan Koalisi Perempuan Indonesia), media (Mongabay Indonesia dan Kompas Jawa Tengah), dan akademisi (Sosiologi dan Pertanian Universitas Sebelas Maret) serta objek penelitian itu sendiri (Perempuan Petani dan Laki-Laki Petani).

Oleh karena itu pada penelitian ini, juga menggunakan pendekatan pertanyaan yang bertipe *open-ended questions* agar mendapatkan informasi mendalam tentang kerentanan gender sebagai akibat dari fenomena krisis iklim melalui pertanyaan yang kurang familiar —dengan begitu form wawancara akan bersifat tidak terstruktur karena percakapan cenderung mengalir dan adaptif (*unstructured interviews*) (Halperin & Heath, 2012: 254-260).



c. Studi Dokumentasi

Pada proses ini, studi dokumentasi diperlukan dalam menganalisis gambaran dan hasil rekaman-rekaman yang telah ada sebelumnya, khususnya dalam menganalisis gambar dan rekaman meteorologis/klimatologis yang berpengaruh pada pergerakan krisis iklim dan dampaknya di Kabupaten Karanganyar. Hal ini dilakukan sebagai penguat argumentasi dan analisis penelitian yang dibuat dan dialami oleh subjek penelitian.

### **1.7.7 Teknik Analisis dan Interpretasi**

Analisis data digunakan diambil dari Miles dan Huberman yang juga terdapat dalam Halperin & Heath (2012), terlihat setidaknya ada empat tahap utama dengan menggunakan teknik – teknik yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan tahap studi *preliminary* untuk memastikan permasalahan yang diteliti *exist*. Kemudian peneliti melakukan kegiatan observasi dan wawancara langsung kepada subjek penelitian yang kemudian hasilnya akan diolah ke tahap berikutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstaksi, dan mentransformasi data yang muncul di lapangan melalui kegiatan pencatatan lapangan atau transkripsi. Kegiatan yang dilakukan di atas didasari oleh kegiatan observasi lapangan peneliti dalam melihat

secara spesifik kerentanan gender yang diakibatkan oleh fenomena krisis iklim di Karanganyar, Jawa Tengah.

c. *Coding*

Proses *coding* serupa dengan menyajikan data yang diturunkan kedalam beberapa kategori untuk mempermudah eksaminasi data yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Kegiatan ini sangat penting bagi penelitian ini khususnya dalam memaknai kerentanan gender akibat krisis iklim karena dengan penyajian data yang terkategori secara tepat akan mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan.

d. Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir ini analisis data dan penyajian data dikelola untuk dihubungkan satu sama lain dengan tujuan untuk membawa fokus makna yang menjawab pertanyaan penelitian, hal ini juga menjadi tahap untuk menarik hasil dari uji verifikasi data yang diperoleh.